

**PENGARUH TERSANGKA OPERASI TANGKAP TANGAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP ELEKTABILITAS
MUSTAFA**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

**VENY ALVIONITA
NPM. 1531040130**

Jurusan: Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M**

**PENGARUH TERSANGKA OPERASI TANGKAP TANGAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP ELEKTABILITAS
MUSTAFA**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi
Agama**

Oleh

**VENY ALVIONITA
NPM. 1531040130**

JURUSAN: Pemikiran Politik Islam

**Pembimbing I : Dr. Nadirsah Hawari, M.A.
Pembimbing II : Drs. Agustamsyah, M.I.P.**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

PENGARUH TERSANGKA OPERASI TANGKAP TANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP ELEKTABILITAS MUSTAFA

VENY ALVIONITA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa, yang juga Calon Gubernur Lampung diusung Partai NasDem, Hanura dan PKS, sebagai tersangka kasus dugaan suap ke DPRD persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018. Berbeda halnya dengan kepala daerah terpilih yang berstatus terdakwa, maka tetap menjadi calon kepala daerah terpilih jika tuntutan pidana yang diberikan kepadanya tidak lebih dari 5 tahun hukuman penjara dan karena belum dijatuhi putusan atau vonis pengadilan atau hakim. Dalam Pasal 124 PP Nomor 6 tahun 2005 mengatur bahwa kepala daerah dapat diberhentikan sementara jika dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat elektoral pasangan calon Nomor 4 (Mustafa dan Ahmad Jajuli) dan untuk mengetahui pengaruh tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap elektabilitas Mustafa. Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Jenis desain penelitian ini termasuk dalam *ex-post facto*, dimana pada penelitian ini hanya mengungkap gejala-gejala yang ada atau telah terjadi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Elektoral pasangan calon Nomor 4 (Mustafa dan Ahmad Jajuli) sebelum terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Mustafa sebagai calon Gubernur Lampung periode 2019-2024 menurun secara drastis. Pengaruh tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap elektabilitas Mustafa mempengaruhi tingkat elektabilitasnya sebagai Calon Gubernur (Cagub) Lampung. Bahkan, mantan Ketua Partai NasDem Lampung itu kehilangan basis massa di wilayah yang dipimpinnya, yakni Lampung Tengah.

Kata Kunci: Tersangka, OTT, KPK dan Elektabilitas

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Veny Alvionita
NPM : 1531040130
Jurusan/ Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Study Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul ”Pengaruh Tersangka Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Elektabilitas Mustafa” merupakan hasil karya sendiri, bukan duplikat ataupun mengambil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau daftar pustaka.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan Apabila dilain waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan saya bersedia untuk bertanggung jawab.

Bandar Lampung,
Yang Membuat Pernyataan,

VENY ALVIONITA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: *Jl. Letkol.H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289*

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pengaruh Tersangka OTT KPK terhadap
Elektabilitas Mustafa**
Nama : **Veny Alvionita**
NPM : **1531040130**
Jurusan : **Pemikiran Politik Islam**
Fakultas : **Ushuluddin Dan Studi Agama**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Nadirsah Hawari, M.A
NIP. 197406282008011013

Pembimbing II

Drs. H. Agustamsyah, M.I.P
NIP. 196801041994031003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam

Dr. Tin Amalia Fitri, M. Si
NIP. 197801302011012004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PENGARUH TERSANGKA OTT KPK TERHADAP ELEKTABILITAS MUSTAFA**. Disusun oleh **VENY ALVIONITA**. NPM : **1531040130**. Prodi : **PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**. Fakultas : **USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**, telah dimunaqosyahkan pada hari/tanggal : **SELASA, 15 OKTOBER 2019**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. Tin Amalia Fitri, M. Si**

Sekretaris : **Angga Natalia, M.I.P**

Penguji Utama : **Dr. Ali Abdul Wakhid, M. Si**

Penguji I : **Dr. H. Nadirsah Hawari, M.A**

Penguji II : **Drs. H. Agustamsyah, M.IP**

DEKAN

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

M. Afif Anshori, M. Ag

960031319890031004



MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

(Al-Qur'an Surat. Al-Baqarah: 188)¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2013), h. 29.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmad yang telah dilimpahkan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kebahagiaan kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. (Alm) Ayahanda Rosihidar Terimakasih atas Limpahan kasih sayang semasa hidupmu dan memberikan rasa rindu yang bearti. Lantunan Al-Fatihah beriring shalawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terimakasih untukmu Ayahku. dan terimakasih kepada Umiku Karlina yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat,doa,dorongan dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan. Ku persembahkan sebuah karya kecil ini untuk Umiku. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk umi ya. Amin...
2. Ajoku Devy Natalia Fransiska Amd.keb teman berantem sekaligus teman curhatku yang selalu memotivasi dan menyemangatiku.
3. Adikku yang tuan Zeva Kurniawan ini semua berkat do'a, kasih, dan sayang kepada kakaknya.
4. Keluarga besar BANI WAHAB dan Alm BANI M.idrus yang selalu mendoakan, memberikan support dan memberi semangat untuk keberhasilanku.
5. Teruntuk semua orang yang menanyakan kapan saya wisuda

RIWAYAT HIDUP

Peneliti Veny alvionita dilahirkan di Reno basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten lampung tengah. Pada tanggal 22 Februari 1997. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Rosihidar(Ayah) dan Umi(Karlina). Peneliti menyelesaikan pendidikan Taman Kanak Kanak di TK LKMD Reno basuki dan selesai pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan formal tingkat dasar di SDN 2 Reno basuki dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan di Mts 04 Rumbia hingga lulus di tahun 2012, Pendidikan selanjutnya di SMA Negeri 1 Rumbia hingga lulus di tahun 2015 dan pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Jurusan Pemikiran Politik Islam. Pada bulan juli 2018 peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Banjarejo Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu.

Bandar Lampung, 4 oktober 2019

Penulis

VENY ALVIONITA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pengaruh Tersangka Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Elektabilitas Mustafa"**. Sholawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana ilmu sosial (S.Sos).

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Dr. H. M Afif Anshori, M.Ag** selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu **Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si** selaku Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak **Dr. Nadirsah Hawari, M.A** selaku pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi ini selesai.

4. Bapak **Drs. Agustamsyah, M.I.P** selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada segenap keluarga civitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
6. Petugas perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung serta Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak ketua dan wakil Kpu Lampung Tengah, dan Masyarakat di Kecamatan Terbanggi Besar yang penulis jadikan objek penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan Pemikiran Politik Islam angkatan 2015.
9. Teman seperjuanganku Eka zalika salamia, Emilia susanti, Nilam pelita bhakti, Yuli purwanti, Zesy harviliana Citra ,Sandra wijaya, M.ilham dan kedua Aktifis saya Ahmad guntur dan Fakhrurazzi.
10. Teman seperjuanganku Diah intan Pertiwi dan Agustina pudji Rahayu comming soon S.sos
11. Almamaterku Fakultas Ushuluddin dan studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

Akhirnya, dengan keyakinan niat tulus ikhlas dan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Ushuluddin dan Studi Agama.

Bandar Lampung, 04 Oktober 2019

Veny alvionita
NPM. 1531040130



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Penelitian	12
G. Metode Penelitian	13
H. Tinjauan Pustaka	16

BAB II. KORUPSI DAN ELEKTABILITAS

A. Tinjauan Umum Korupsi	18
1. Pengertian Korupsi	18
2. Faktor yang Menyebabkan Korupsi	34
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	36

B. Tinjauan Umum Elektabilitas.....	39
1. Pengertian Elektabilitas.....	39
2. Jenis-Jenis Elektabilitas	41
3. Faktor yang Mempengaruhi Elektabilitas.....	42

BAB III. PASANGAN CALON MUSTAFA DAN PROSES OTT

A. Identifikasi Reputasi Mustafa	45
B. Proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Mustafa.....	46
C. Penetapan Mustafa sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	52

BAB IV. OPERASI TANGKAP TANGAN DAN ELEKTABILITAS MUSTAFA

A. Pengaruh Tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Elektabilitas Mustafa.....	54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah berjudul: **“PENGARUH TERSANGKA OPERASI TANGKAP TANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP ELEKTABILITAS MUSTAFA”**.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka kiranya perlu adanya diuraikan terlebih dahulu terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini, sehingga dengan adanya penegasan judul diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut.

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas menjadi indikator penting bagi delapan bakal calon (balon) kepala daerah yang mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer.¹

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jika identitas sang tersangka sudah diketahui, dan keputusan penangkapan atau pendakwaan terhadapnya telah disetujui oleh

¹ Dan Nimmo. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. (Bandung: Rosda Karya, 2009), hal. 145.

seorang penuntut umum yang mengeluarkan informasi, sebuah kelompok juri yang mengeluarkan dakwaan, atau seorang hakim mengeluarkan surat perintah penangkapan, maka sang tersangka dapat disebut sebagai terdakwa.²

Operasi tangkap tangan dalam konteks pembuktian, ada beberapa catatan terkait operasi tangkap tangan. Pertama, ada perbedaan prinsip pembuktian dalam perkara perdata dan perkara pidana. Dalam perkara perdata, para pihak yang melakukan hubungan hukum keperdataan cenderung mengadakan bukti dengan maksud jika di kemudian hari terjadi sengketa, para pihak akan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat argumentasinya di pengadilan. Hal ini berbeda dengan perkara pidana, di mana pelaku selalu berusaha meniadakan bukti atau menghapus jejak atas kejahatan yang dilakukan. Operasi tangkap tangan lebih efektif untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktian, termasuk kejahatan korupsi.³

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.⁴

Berdasarkan penegasan istilah dalam judul di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul ini suatu penelitian untuk mengungkap dan membahas secara lebih mendalam mengenai pengaruh tersangka Operasi

² Pasal 1 angka 14 KUHP

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 7.

⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hal. 19

Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap elektabilitas Mustafa.

Berdasarkan kesimpulan uraian dan keterangan di atas, bahwa yang dimaksud dengan skripsi ini adalah penulis akan meneliti dan membahas bagaimana pengaruh tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap elektabilitas Mustafa secara politik.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan yang mendorong penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif Ilmiah

- a. Penulis ingin mengetahui pengaruh tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap elektabilitas Mustafa secara politik.

2. Alasan Subyektif Ilmiah

- a. Penulis berasal dari daerah dimana penelitian dilakukan yaitu Kabupaten Lampung Tengah, sehingga memungkinkan penulis lebih mudah mengumpulkan data yang dibutuhkan.
- b. Judul yang diangkat ada relevansinya dengan perkembanagn mata kuliah Pemikiran Politik Islam yang ada pada Jurusan Pemikiran Politik Islam dan lokasinya mudah terjangkau.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut asas demokrasi. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang didasarkan pada Pancasila yang disebutkan dalam sila ke-4 yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Hal tersebut berarti bahwa rakyat menjalankan kekuasaan melalui sistem perwakilan dan keputusan diperoleh melalui jalan musyawarah dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Rakyat Indonesia.

Salah satu manifestasi dari demokrasi di Indonesia yaitu adanya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum sebagai sarana Demokrasi Pancasila dimaksudkan untuk membentuk sistem kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan pemilu di Indonesia didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia”. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) mengatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya gubernur dan wakil gubernur adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan, oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilgub merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislatif, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum,

⁵ Ali Moertopo, *Stabilitas Politik Pada Masa Pemerintahan Odre Baru*, Jakarta: PT Elex. Media Komputindo, Jakarta, 2010, hal. 79

bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk menjalankan pemilu, maka terdapat penyelenggara pemilu. Penyelenggara tersebut yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).⁶

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia terdiri atas tiga macam yaitu, Pemilu Legislatif (Pileg) yaitu pemilihan yang dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu Presiden (Pilpres) yaitu pemilihan yang dilakukan untuk memilih kepala negara. Selanjutnya Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan yang dilakukan untuk memilih kepala daerah.⁷

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa, yang juga Calon Gubernur Lampung diusung Partai NasDem, Hanura dan PKS, sebagai tersangka kasus dugaan suap ke DPRD persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018. Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan membenarkan penetapan tersangka Mustafa tersebut. Sebelumnya, KPK telah lebih dahulu menetapkan tiga tersangka kasus ini. Ketiganya yakni, Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga (JNS), Anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto (RUS), dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. J Natalis Sinaga, Rusliyanto, dan Taufik Rahman telah ditahan KPK. Mereka ditahan di Rumah Tahanan terpisah. Natalis ditahan di Polres Jakarta Timur dan Taufik ditahan Rusliyanto ditahan di Polres Jakarta Pusat di Rutan

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

⁷ Ali Moertopo, *Ibid*, hal. 79

Guntur. Ketiganya ditahan untuk 20 hari pertama demi kepentingan penyidikan.⁸

Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015 yang lalu sebagai implementasi dari salah satu dari prinsip demokrasi, yakni dilakukannya pemilihan pejabat publik (kepala daerah) secara periodik (lima tahun sekali). Pilgub yang demokratis untuk menghasilkan pemimpin daerah yaitu pasangan kepala daerah dan wakilnya yang absah serta berintegritas merupakan cita-cita dan harapan kita semua dalam berdemokrasi. Karena itu, arti penting demokrasi dalam Pilgub tidak hanya sekedar seremonial demokrasi untuk memilih pasangan calon kepala daerah semata melainkan juga untuk menjalankan proses demokrasi secara baik dan berintegritas.

Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015 yang lalu sebagai implementasi dari salah satu dari prinsip demokrasi, yakni dilakukannya pemilihan pejabat publik (kepala daerah) secara periodik (lima tahun sekali). Pilgub yang demokratis untuk menghasilkan pemimpin daerah yaitu pasangan kepala daerah dan wakilnya yang absah serta berintegritas merupakan cita-cita dan harapan kita semua dalam berdemokrasi.

⁸ Fahdi Fahlevi, 2018, *KPK tetapkan Bupati Lampung Tengah sebagai tersangka suap pinjaman APBD*, (online) tersedia di <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/16/kpk-tetapkan-bupati-lampung-tengah-sebagai-tersangka-suap-pinjaman-apbd>, diakses (15 Oktober 2018).

Tabel 1. Hasil pleno DPT Pilgub Lampung 2018 secara lengkap dari 15 KPU kabupaten/kota

No	Kabupaten/Kota	Jumlah DPT
1	Lampung Tengah	898.788
2	Lampung Timur	756.754
3	Lampung Selatan	699.932
4	Bandar Lampung	622.829
5	Tanggamus	440.522
6	Lampung Utara	418.420
7	Way Kanan	321.645
8	Pesawaran	321.036
9	Pringsewu	288.161
10	Tulangbawang	251.200
11	Lampung Barat	203.026
12	Tulangbawang Barat	188.998
13	Mesuji	142.162
14	Metro	109.977
15	Pesisir Barat	104.803

Sumber: KPU Provinsi Lampung (2018)

Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui bahwa dari 15 kabupaten/kota, jumlah calon pemilih Pilgub Lampung 2018 terbanyak berada di Lampung Tengah dan Lampung Timur. Dalam pleno, KPU Lamteng menetapkan DPT sebanyak 898.788. Sementara di Lamtim, KPU setempat memastikan DPT sebanyak 756.754. jumlah DPT Pilgub 898.788 menurun ketimbang DPT Pilgub Lamteng 2015 yang mencapai 981.069.⁹.

Merujuk teori kontrak sosial yang diajarkan J.J. Rosseau, maka Pilgub Lampung hendaknya dilaksanakan dengan cara yang mendekati pada tercapainya kehendak (pilihan mayoritas) masyarakat. Calon pemimpin dan penyelenggara pemerintahan yang terpilih harus memiliki integritas dan kapabilitas yang sesuai dengan harapan. Karena itu pengetahuan, integritas serta kecerdasan pemilih dalam memilih pemimpin dalam Pilgub menjadi

⁹ Yoso, 2018, *15 KPU Kabupaten/Kota Pleno Data Pemilih Pilgub Lampung, Ini Hasilnya*, (online) tersedia di <http://lampung.tribunnews.com/2018/04/18/15-kpu-kabupatenkota-pleno-data-pemilih-pilgub-lampung-ini-hasilnya?page=all>, diakses (3 Desember 2018)

faktor sangat penting. Berintegritas dimaksudkan memiliki sikap yang terpuji, mampu menjadi tauladan, dapat dipercaya, adil/bijaksana, dan lain sebagainya. Kapabilitas dimaksudkan mereka yang terpilih memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan daerah secara amanah, profesional berdasarkan hukum. Persoalan yang kemudian muncul ialah ketika seseorang tengah berstatus calon kepala daerah dalam kontestasi Pilgub namun ia juga sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, apa implikasi yuridisnya.

Implikasi politik terhadap pasangan calon kepala daerah terpilih yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. partai politik yang mengusung calon kepala daerah dengan status tersangka tak dirugikan di hari pencoblosan dengan citra pasangan calon yang telah tergerus. Ditetapkannya calon kepala daerah terpilih kemudian menjadi tersangka selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan ia terbukti bersalah, tidak serta merta membuat statusnya sebagai calon kepala daerah terpilih dicabut. Tersangka, tetap dapat menjadi calon kepala daerah terpilih karena status tersangka adalah status “berhalangan sementara” dan belum dijatuhi putusan/vonis pengadilan/hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁰

Pasal 58 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 hanya mengatur tentang syarat bahwa calon kepala daerah tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih

¹⁰ Diamanty Meiliana, *Polemik Penggantian Calon Kepala Daerah Berstatus Tersangka*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/28/11103761/polemik-penggantian-calon-kepala-daerah-berstatus-tersangka?page=all>.

dari 5 (lima) tahun. Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian memberikan penafsiran, pasal tersebut tidak berlaku bagi mereka yang melakukan tindak pidana politik dan perkara kealpaan ringan. Kemudian Pasal 97 ayat (1) PP No. 49 Tahun 2008, yang membuat kepala daerah terpilih tidak dilantik adalah jika ia berhalangan tetap. Jika calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah. Akan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “berhalangan tetap”. Bagi calon kepala daerah terpilih yang menang dalam Pilgub dapat dilakukan pelantikan karena status sebagai tersangka dianggap bukan “halangan tetap”.¹¹

Ditetapkannya calon kepala daerah terpilih kemudian menjadi tersangka selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan ia terbukti bersalah, tidak serta merta membuat statusnya sebagai calon kepala daerah terpilih dicabut. Tersangka, tetap dapat menjadi calon kepala daerah terpilih karena status tersangka adalah status “berhalangan sementara” dan belum dijatuhi putusan/vonis pengadilan/hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam persyaratan calon kepala daerah yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa calon kepala daerah tidak boleh berstatus sebagai tersangka, tetapi yang dipersyaratkan adalah calon kepala daerah tidak pernah sebagai terpidana atau jika menjadi mantan terpidana harus secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 58 huruf F

terpidana. Sehingga calon kepala daerah terpilih yang berstatus sebagai tersangka masih sah sebagai calon kepala daerah terpilih.¹²

Menuurut Nadirsyah Hawari, berbeda halnya dengan calon kepala daerah terpilih yang berstatus tersangka maka tetap dapat menjadi calon kepala daerah terpilih jika tuntutan pidana yang diberikan kepadanya tidak lebih dari 5 tahun hukuman penjara dan karena belum dijatuhi putusan/vonis pengadilan/ hakim. Dalam Pasal 124 PP Nomor 6 Tahun 2005 mengatur bahwa Kepala daerah dapat diberhentikan sementara jika dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.

Berdasarkan latar belakang kondisi di atas penulis mengambil judul: Pengaruh tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap elektabilitas Mustafa.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah yang ada, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap elektabilitas Mustafa?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap elektabilitas Mustafa.

¹² Nadirsyah Hawari, *Parpol Islam Dan Pemberantasan Korupsi DI Indonesia*, <https://www.googlecendikia.com> diunduh Tanggal 3 September 2019.

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu politik dalam permasalahan yang berkaitan dengan pengaruh tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap elektabilitas Mustafa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan bahan masukan bagi Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pengaruh tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap elektabilitas Mustafa di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dari objek penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan kualitatif eksploratif riset yang mengklarifikasikan data yang bersifat kualitatif.¹³ Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dimana masyarakat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dijadikan populasi dan sampel dalam penelitian ini.

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1996), hal. 102,

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan pengaruh tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap elektabilitas Mustafa.

b. Sifat Penelitian

Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Jenis desain penelitian ini termasuk dalam *ex-post facto*. Dalam penelitian *ex-post facto* tidak ada kelompok kontrol atau kegiatan *pre tes*.¹⁴

Hubungan sebab dan akibat antara subjek satu dengan subjek yang lain diteliti tidak manipulasi, karena penelitian *ex-post facto* hanya mengungkap gejala-gejala yang ada atau telah terjadi. Fakta dalam penelitian ini diungkapkan apa adanya dari data yang terkumpul. Dengan demikian penelitian ini mengungkapkan hubungan dari variabel-variabel yang ada.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari pengaruh tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap elektabilitas Mustafa.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

¹⁴ *Ibid* hal. 104,

a. Sumber Data primer

Data yang diperoleh dari sumber utama penelitian, dalam hal ini yaitu data-data yang bersumber dari hasil wawancara dari 7 orang narasumber agar memperoleh data mengenai pengaruh tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap elektabilitas Mustafa.¹⁵

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah Administrasi Pembangunan, Manajemen Pemerintahan, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang didapatkan dari perpustakaan yang ada di sekitar peneliti yang menjadi data sekunder untuk penelitian ini, guna untuk memperoleh data mengenai pengaruh tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap elektabilitas Mustafa.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari:

a. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah dan tujuan penelitian, khususnya mengenai pengaruh

¹⁵ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, Pustaka Baru, 2014). hal. 73.

tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap elektabilitas Mustafa.

b. Metode Dokumentasi

Data sekunder (dokumentasi) adalah data yang diperoleh dari kantor, buku (kepustakaan), Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian, khususnya pengaruh tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap elektabilitas Mustafa.

4. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang dianggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian. Analisis data merupakan proses memanipulasi data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian/proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan.¹⁶

¹⁶ Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal 159.

H. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku-buku, makalah, jurnal, tulisan bebas, skripsi, tesis dan disertasi yang penulis lakukan.

- a. Penelitian Imam Ropii (2017) *Penetapan Status Tersangka dan Terdakwa Calon Kepala Daerah dan Implikasi Yuridisnya Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, menunjukkan bahwa dalam pencalonan kepala daerah terdapat berbagai macam ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Ketentuan calon dan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah berlaku untuk calon dan pencalonan Gubernur, Bupati dan Walikota beserta wakil-wakilnya. Ketentuan calon kepala daerah dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 wajib dipenuhi sebelum mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah. Sedangkan, ketentuan pencalonan kepala daerah harus dipenuhi saat ingin mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah.
- b. Penelitian Maulana Yusuf (2017) *Kedudukan Calon Kepala Daerah Yang Menjadi Tersangka Dihubungkan Dengan KUHAP Jo Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang*, Dengan demikian, demi tercapainya negara Indonesia yang menjunjung tinggi demokrasi parameter terwujudnya ialah pemilihan umum rekrutmen jabatan politik atau publik harus dilakukan berdasarkan pemilu yang langsung, terbuka dan jujur. Ciri perkembangan demokrasi Indonesia saat ini ialah

pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat daerahnya, sejak berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilgub dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah”. Oleh sebab itu untuk menjaga pemilihan langsung pilgub tersebut maka seorang calon kepala daerah tersebut haruslah bersih dari segala bentuk indikasi tindak pidana. Jika calon kepala daerah yang menjadi tersangka, padahal tersangka sendiri menurut KUHAP dalam Butir 14 adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, jadi berdasarkan bukti permulaan yang kuat seorang calon kepala daerah tersebut telah diduga melakukan tindak pidana. Jika kedudukan tersangkatersebut ditetapkan setelah penetapan pendaftaran selesai, seorang kepala daerah yang berkedudukan sebagai tersangka tetap memiliki hak-hak politik seperti dipilih, memilih dan melakukan kampanye, tetapi karena kedudukannya sebagai tersangka ada kewajiban yang harus diselesaikannya yaitu kewajiban secara pidana karena penetapannya sebagai tersangka.

Sedangkan pada penelitian ini yang akan menjadi pokok bahasan adalah Pengaruh tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap elektabilitas Mustafa. yang berbeda dengan penelitian sebelumnya baik dalam penggunaan maupun subjek penelitian yang diambil.

BAB II

KORUPSI DAN ELEKTABILITAS

A. Tinjauan Umum Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi menurut Mochtar Lubis & James C. Scott (didasarkan pada *Webster's Third New International Dictionary*) adalah perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan iktikad buruk misalnya suap) agar melakukan pelanggaran kewajibannya.¹⁷

Rumusan pengertian mengenai korupsi tersebut di atas terlihat bahwa korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah ke atas, atau yang dinamakan dengan *White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian, bahkan menurut Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.¹⁸

Korupsi merupakan penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah. Selaras dengan pendapat di atas, menurut Indriyanto Seno Adji, bahwa tak dapat dipungkiri korupsi merupakan *White Collar Crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami

¹⁷Mochtar Lubis & James C. Scott. 1993. *Bunga Rampai Korupsi*. LP3ES, Jakarta. h. 86.

¹⁸Harkristuti Harkrisnowo. 2002. *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*. Jurnal DictumLeIP Edisi I Lentera Hati, Jakarta, h. 67.

dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *Invisible Crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.¹⁹

Menurut Chaerudin, dkk, Robert Klitgaard secara kritis menyatakan bahwa: Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebiaksanaan, ketentuan tarif, dan perkreditan, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi dalam kedua sektor tersebut secara simultan. Hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya, pada sejumlah negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya. dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan atau melakukan. dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah. dapat di dalam ataupun di luar organisasi publik. Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan.²⁰

¹⁹ Indryanto Seno Adji. 2006. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Diadit Media, Jakarta, h. 374.

²⁰ Chaerudin dkk. 2006. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama, Bandung, h. 3-4.

Perumusan korupsi menurut Robert Klitgaard tersebut menunjukkan korupsi merupakan kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya luar biasa dan dapat merongrong kepentingan perekonomian rakyat secara signifikan, Ronny Rahman Nitibaskara menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di masyarakat kita sudah menjadi endemik yang sulit diatasi. Tindak pidana korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa, hanya kualitas dan kuantitas perkembangbiakannya yang luar biasa.²¹

Senada dengan apa yang dikatakan Ronny Rahman Nitibaskara tersebut, menurut Hendarman Supandji Tindak Pidana Korupsi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya. semakin besarnya jurang perbedaan antara “si kaya” dan “si miskin” telah memicu meningkatnya jumlah dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat.²²

Menurut Asep Rahmat Fajar Tingkat perkembangan korupsi yang demikian luar biasa disebabkan oleh penanganan korupsi belum sesuai dengan harapan publik. Berbanding terbaliknya penanganan korupsi di Indonesia dengan harapan publik tersebut ditunjukkan dengan memberikan bukti empirik bahwa “akhir-akhir ini salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia yang kembali mendapat sorotan tajam adalah lembaga Kejaksaan. Terlebih lagi dengan adanya beberapa kasus yang secara nyata (sedang diproses oleh KPK) telah menunjukkan bahwa

²¹Ronny Rahman Nitibaskara. 2005. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Kompas, Jakarta, h. 5

²²Hendarman Supandji. 2009. *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*. Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, Tanggal 27 Februari 2009, h. 1

oknum Jaksa melakukan proses jual beli perkara atau menerima suap dari pihak yang berperkara”.²³

Dalam hal ini berlaku istilah “*het recht hinkt achter de feiten*” (hukum itu berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan). Salah satu hal yang menyebabkan tertatih-tatihnya hukum mengikuti kenyataan itu terjadi adalah masih adanya anggapan dari para ahli hukum bahwa hukum sebagai sesuatu yang telah tersedia yang tinggal mempergunakan saja, mereka menyamakan hukum dengan Undang-Undang. Hukum adalah apa yang diatur oleh Undang-Undang. Pendirian ini kemudian menganggap perubahan atas Undang-Undang adalah tidak penting yang kemudian menempatkan keadilan jauh dari masyarakat.²⁴

Eratnya pengaruh kondisi sosial terhadap hukum juga digambarkan oleh Unger bergantinya tatanan sosial akan menimbulkan tatanan hukum yang baru pula, di mana perubahan dalam dasar-dasar masyarakat mengubah pula dasar-dasar nilai hukum, di mana dasar-dasar nilai hukum ini adalah keadilan, kegunaan (kemanfaatan) dan kepastian hukum. Guna menciptakan hukum yang berkeadilan dan memiliki kemanfaatan bagi seluruh rakyat, dan tidak hanya melandaskan pada kepastian hukum yang bersifat formil, maka perlu ditelusuri secara lebih seksama mengenai apa itu korupsi baik dalam tataran etimologis maupun tataran yuridis, dan

²³ Asep Rahmat Fajar. 2008. *Pembaharuan Kejaksaan: Keharusan di Tengah Berbagai Permasalahan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip Semarang, Tanggal 29 Nopember 2008, h.6

²⁴ *Ibid*, h. 6

bagaimana korupsi begitu cepat bergerak dalam aspek kehidupan masyarakat.²⁵

Korupsi secara etimologis menurut Andi Hamzah berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu "*corruption*", dalam bahasa Belanda "*korruptie*" yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia : korupsi, yang dapat berarti suka di suap.²⁶

Korupsi juga berasal dari kata "*corrupteia*" yang berarti "*bribery*" yang berarti memberikan/menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti *seduction* yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng. Hal yang menarik tersebut biasanya dihubungkan dengan kekuasaan, yang pada umumnya berupa suap, pengelapan dan sejenisnya.

Dalam pengertian yuridis sebagaimana ditegaskan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

Pasal 5, menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau

²⁵ Nadirsyah Hawari, *Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 24.

²⁶ Andi Hamzah. 1995. *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*. Pradnya Paramita, Jakarta, h.135.

berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 11, menyatakan:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

Unsur “melawan hukum” yang terdapat dalam pengertian yuridis di atas dapat diartikan tanpa hak menikmati hasil korupsi”, “memperkaya diri sendiri” adalah berbuat apa saja, sehingga pembuat bertambah kaya, misalnya pemindahbukuan, penandatanganan kontrak dan sebagainya. Khusus mengenai sifat melawan hukum, dalam literatur ilmu hukum pidana paling tidak terdapat 2 (dua) hal yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiel.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Sifat melawan hukum formil adalah semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat

dipidana), dan menurutnya bahwa sifat melawan hukum formil terjadi karena memenuhi rumusan delik dari Undang-Undang. Sifat melawan hukum merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas, yang menurut Dupont *Het legaliteitsbeginsel is een van de meest fundamentele beginselen van het strafrecht* (asas legalitas adalah suatu asas yang paling penting dalam hukum pidana).²⁷

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - (a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - (b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - (c) Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - (d) Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

²⁷Syed Hussain Alatas, *Op. Cit.*, Jakarta, 1983, h. 45

Menurut Komariah Emong Sapardjaja dengan asas legalitas, hukum pidana merupakan hukum Undang-Undang dalam pengertian bahwa tidak ada tempat bagi hukum tak tertulis tertulis (hukum kebiasaan). Karena itu pula bagi perumusan delik dalam ketentuan Undang-Undang dianut prinsip *lex certa*, yaitu bahwa Undang-Undang harus dirumuskan secermat mungkin sehingga Undang-Undang tersebut dapat dipercaya, dengan memberikan batasan yang tajam dan jelas wewenang pemerintah terhadap rakyat.²⁸

Berkaitan dengan batasan yang diberikan oleh undang-undang tersebut, pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana, tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah “mengatur masyarakat” melainkan “mengatur penguasa”. Untuk itulah penguasa tidak boleh sewenang-wenang dalam menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang harus dijatuhkan pada si pelanggar, dengan demikian hukum yang dijalankan akan mendapat legitimasi dari masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan, dengan melandaskan pada prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai cerminan keadilan. Mengenai Sifat melawan hukum formil ini Enschede memandang bahwa hukum pidana hanyalah rumusan delik, yang menunjukkan fragmen-fragmen dari norma-norma yang dapat dipidana.²⁹

²⁸Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum PidanaIndonesia*. Alumni, Bandung, h. 6.

²⁹Nadirsyah Hawari, *Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2009), h. 24.

Menurut P.A.F. Lamintang adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat “melawan hukum” apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Mengenai sifat melawan hukum materil, suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam Undang-Undang (yang tertulis) saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum sama bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya. Jika diperhatikan maka, sifat melawan hukum materiil tersebut identik dengan sebuah kejahatan atau *rechdelict* adalah perbuatan yang bertentangan keadilan, terlepas apakah perbuatan diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan rasa keadilan.³⁰

Pada hakikatnya sifat melawan hukum secara materiel telah diakui dan menjadi bagian dari sistem hukum di kalangan *civil law* sejak 31 Januari 1919 yang dikenal dengan *Januarie revolutie*, di mana pada saat itu Mahkamah Agung Belanda memutuskan berdasarkan sifat melawan hukum Materiel untuk kasus Lindenbaum versus Cohen dalam kasus percetakan buku.

Mahkamah Agung Belanda berpendapat suatu perbuatan bersifat melawan hukum bukan saja karena bertentangan dengan undang-undang (*wet*), tetapi tersebut didasarkan atas alasan/pertimbangan sebagai berikut:

³⁰ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 351.

- (a) Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntunan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan Perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang lebih dahulu ada.
- (b) Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu ada telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum Crime sine lege stricta*.
- (c) Konsep hukum secara formil tertulis, (*formele wederrechelijk*), yang mewajibkan pembuat Undang-Undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*.

Perbuatan jahat bukan hanya yang tertuang dalam atau dirumuskan dalam Perundang-undangan tetapi juga menurut hukum tak tertulis. Berdasarkan keilmuan maupun secara yuridis, bahwa sifat melawan hukum materiel tidak dapat dikesampingkan hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal, ialah:

- a. Kesepakatan Seminar Hukum Nasional I pada tanggal 11 Maret 1963 di Jakarta yang merumuskan bahwa perbuatan jahat tidak hanya mendasarkan pada KUHP, tapi juga berdasarkan hukum tak tertulis.
- b. Landasan hukum internasional yang bertolak dari Pasal 15 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang menyebutkan adanya dua sumber yang dapat dipidana yaitu:
 - 1) Berdasarkan Undang-Undang atau hukum positif yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.
 - 2) Berdasarkan asas-asas/prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

- c. Dengan demikian yang dimaksud kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Kepastian hukum tertulis dan kepastian hukum tak tertulis.
- d. Pengakuan terhadap hukum tak tertulis tersebut ditegaskan dalam Pasal 18B angka (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia...”.

Pengertian korupsi secara yuridis tersebut juga memasukan unsur-unsur yang menyangkut kewenangan dan jabatan yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam korupsi dengan model demikian Robert Klitgaard memberikan rumusan dengan model matematis yaitu $(C=M+D-A)$ jadi *Corruption = Monopoly Power + Discretion by Official – Accountability*, sehingga korupsi terjadi karena adanya monopoli atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan pada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Rumusan korupsi model ini memiliki persamaan dengan ungkapan Lord Action bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak.³¹

Korupsi yang dilakukan dengan penggunaan kekuasaan pada intinya dilakukan karena lemahnya kontrol sosial, atau lingkungan sosial yang membentuknya demikian, terutama lingkungan yang ada dalam

³¹ P.A.F. Lamintang. *Op Cit*, h. 351.

kekuasaan yang sudah dihinggap oleh tanggung jawab yang hilang. korupsi meliputi penyimpangan tingkah laku standar, yaitu melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk memperkaya diri sendiri, oleh karenanya diperlukan kontrol sosial. Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dan tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi. Bahkan tingkah laku yang menyimpang tergantung pada kontrol sosial. Ini berarti, kontrol sosial menentukan tingkah laku bagaimana yang merupakan tingkah laku yang menyimpang. Makin tergantung tingkah laku itu pada kontrol sosial, maka semakin berat nilai penyimpangan pelakunya. jadi tindakan menyimpang tidak dibenarkan karena masyarakat secara umum merasa tindakan-tindakan tersebut tidak dapat diterima.

Sikap penolakan masyarakat terhadap perilaku menyimpang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan, di mana kejahatan tersebut merupakan hal yang tercela bagi masyarakat. Kejahatan merupakan tindakan yang tidak disepakati secara umum oleh anggota masing-masing masyarakat. Suatu tindakan bersifat kejahatan ketika tindakan tersebut melanggar kesadaran bersama yang kuat dan terdefinisi. Kejahatan merupakan hal yang disepakati oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kontrol sosial sebagai kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Kontrol sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.³²

Menurut Satjipto Rahardjo sendiri bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat, kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasi secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya.³³

Bahkan di Malaysia, kontrol sosial tidak hanya dilakukan oleh lembaga yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, hal tersebut di sampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi, bahwa di Malaysia setiap warga harus menjadi pemantau atas korupsi di pemerintahan. Hal tersebut menjadi wajar, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan sosial dan yang paling dirugikan adalah masyarakat.³⁴

Pada prinsipnya kejahatan hanyalah semata-mata apa yang dikatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang, pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Terlebih lagi korupsi mempunyai dimensi kerugiannya sangat besar karena dapat

³² Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta. h. 119.

³³ *Ibid.* h. 120.

³⁴ *Ibid.* h. 121.

merusak keuangan dan perekonomian negara, yang akan sangat berdampak negatif pada perekonomian rakyat. Hal ini disebabkan pada hakikatnya bahwa kejahatan (terutama korupsi) berakar dan bergantung dari hasil proses interaksi dalam wadah nilai-nilai sosial, aspek budaya dan struktural masyarakat yang bersangkutan.

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang dan perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. dapat menimbulkan ketegangan–ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Namun demikian setiap tindakan /perbuatan manusia ditentukan oleh kepribadian dan sikap kejiwaan dari mereka yang melahirkan tindakan/atau perbuatan tersebut dan juga oleh efek dari tindakan di alam lahir/dunia luar. Tampaknya pendirian ini dipengaruhi oleh pemikiran kaum *determinis*.

Sebagai suatu kejahatan, korupsi di Indonesia merupakan suatu fenomena yang sangat serius, korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa.

Sebagai kejahatan yang sangat serius, korupsi di Indonesia tidak saja mengalami peningkatan secara kuantitas tetapi juga secara kualitas sehingga korupsi juga dapat dipandang sebagai *universal phenomena* yaitu

suatu kejahatan yang tidak saja jumlahnya yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa-masa yang lalu. Untuk itulah setiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya.

Agar peraturan-peraturan tersebut mampu maka menurut Lon L. Fuller yang dikutip Satjipto Rahardjo, peraturan itu harus memiliki *principles of legality* sebagai berikut:

- a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- b. Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut harus diumumkan.
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti
- e. Sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.³⁵

Oleh karena itu agar tidak terjadi ketidaktertiban sosial diperlukan adanya aturan dalam rangka menanggulangi tindakan dan akibat jahat dari

³⁵ Satjipto Rahardjo. *Op. Cit*, h. 119

tindakan korupsi, yang pada hakikatnya dapat merusak kehidupan sosial, dan peraturan tersebut harus sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa korupsi berarti memberikan/menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti *seduction* yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng. Hal yang menarik tersebut biasanya dihubungkan dengan kekuasaan, yang pada umumnya berupa suap, pengelapan dan sejenisnya.

2. Faktor yang Menyebabkan Korupsi

Istilah Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana yang disimpulkan oleh Poerwadarminta adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Mengenai istilah Korupsi itu sendiri, menurut Sudarto bermula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam konsideran Peraturan Penguasa Militer tersebut dikatakan “bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha-usaha memberantas korupsi”.

Berdasarkan konsiderans tersebut menurut Hermien Hadiati Koeswadji terdapat dua unsur mengenai korupsi yaitu:

- (1) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain maupun untuk kepentingan sesuatu badan, dan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara.
- (2) Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang menerima gaji/upah dari (yang berasal dari) keuangan Negara atau daerah atau suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan/ kewenangan/ kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau material baginya.³⁶

Leden Marpaung dalam memaknai korupsi lebih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, menurutnya bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.³⁷

Menurut Syed Hussein Alatas secara implisit menyebutkan tiga bentuk korupsi yaitu sogokan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme. Alatas mendefinisikan nepotisme sebagai pengangkatan kerabat, teman, atau sekutu politik untuk menduduki jabatan-jabatan publik, terlepas dari kemampuan yang dimilikinya dan dampaknya bagi kemaslahatan umum. Inti ketiga bentuk korupsi menurut kategori Alatas ini adalah subordinasi kepentingan umum di bawah tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran-pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, yang dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan sikap masa bodoh terhadap akibat yang ditimbulkannya terhadap masyarakat. Secara umum faktor penyebab korupsi adalah

³⁶Harmien Hadiati dan Koeswadji. 1994. *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ketindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.7.

³⁷Leden Marpaung. 2004. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Djambatan, Jakarta, h. 5

pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi, penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri dan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri.³⁸

Menurut Syed Hussein Alatas terdapat pula hubungan antara korupsi dengan kekuasaan, hukum dan budaya. Faktor kekuasaan, seorang sejarawan Inggris telah mengucapkan kata-kata yang termashur : *“The power tends to corrupt, absolute powers corrupts absolute “* (kekuasaan itu cenderung ke korupsi, kekuasaan mutlak mengakibatkan korupsi mutlak pula). Faktor yuridis, korupsi yang disebabkan oleh faktor yuridis yaitu berupa lemahnya sanksi hukum maupun peluang terobosan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jika membicarakan lemahnya sanksi hukuman berarti analisis pemikiran dapat mengarah pada dua aspek yaitu aspek peranan hakim dalam menjatuhkan hukuman dan aspek sanksi yang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor budaya, faktor ini berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral. Dalam faktor ini termasuk tidak adanya budaya malu.³⁹

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Korupsi, sehingga mencakup tiga kelompok (yang ada sekarang hanya dua kelompok), yaitu Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana lain yang

³⁸Syed Hussein Alatas, 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. LP3ES, Jakarta, h. 45.

³⁹*Ibid*, h. 45

berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana setelah terjadi korupsi. Hal yang tersebut terakhir ini adalah penarikan *money laundering* menjadi Tindak Pidana Korupsi dan kriminalisasi bentuk-bentuk pembantuan setelah Tindak Pidana Korupsi terjadi.⁴⁰

Upaya membuat pelaku kejahatan (*offender*) tidak dapat “menikmati” hasil perbuatannya juga merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu Tindak Pidana sebagai Pidana Tambahan selain Pidana Pokok seperti penjara dan denda, sesuai Pasal 10 *jo* Pasal 39 KUHP yang berbunyi:

Pidana terdiri atas: (KUHP 69)

a. Pidana pokok:

- 1) Pidana mati; (Pasal 6, Pasal 11, Pasal 67 KUHP)
- 2) Pidana penjara; (Pasal 12- Pasal 17, Pasal 24 dst, Pasal 27 dst, Pasal 32 dst, Pasal 38, Pasal 42, Pasal 67 KUHP; Inv. Sw. 2 dst)
- 3) Pidana kurungan; (KUHP Pasal 18- Pasal 33, Pasal 38, Pasal 41 dst.; Inv. Sw. 2 dst)
- 4) Pidana denda; (Pasal 30- Pasal 33, Pasal 38, Pasal 42 KUHP)
- 5) Pidana tutupan (s.d. t. dg. Undang-Undang Nomor 2011946);

b. Pidana tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35 dst, Pasal 38, Pasal 47 KUHP)
- b. Perampasan barang-barang tertentu; (ISR. 145; Pasal 39-42 KUHP)
- c. Pengumuman putusan hakim (Pasal 43, Pasal 47 KUHP)

⁴⁰ Barda N. Arief, *Op Cit*, 2001, h.49.

Bagi Tindak Pidana Korupsi, hal ini dapat juga dilakukan terhadap perampasan harta benda yang tidak dapat dibuktikan (oleh terdakwa) sebagai bukan dari hasil Tindak Pidana Korupsi, sesuai bunyi Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Ditambah lagi dengan pembayaran uang pengganti yang nilainya setara dengan kerugian keuangan negara akibat perbuatannya, sesuai Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
4. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

B. Tinjauan Umum Elektabilitas

1. Pengertian Elektabilitas

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer.⁴¹

⁴¹ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*, Bandung, Rosda. 2009, h 48-49

Kata elektabilitas umumnya muncul berkaitan dengan pemilu, pilkada atau pilpres, seperti dulu waktu jelang pemilu dan pada beberapa daerah di Indonesia yang sedang mengadakan Pilkada. Kata Elektabilitas bisa dikaitkan dengan sosok yang akan dipilih atau nama partai peserta pemilu. Tidak pernah ada Elektabilitas itu dikaitkan dengan produk sepeda motor, padahal pada prakteknya Elektabilitas produk sepeda motor itu yang menentukan dipilih atau tidaknya oleh pembeli.⁴²

Untuk meningkatkan elektabilitas maka sangat tergantung pada teknik kampanye yang dipergunakan. Dalam masyarakat yang belum berkembang, kecocokan profesi tidak menjadi persoalan, yang perlu diingat, tidak semua kampanye berhasil meningkatkan elektabilitas. Ada kampanye yang menyentuh, ada kampanye yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Sementara itu ada kampanye yang berkedok sebagai survei, dengan tujuan untuk mempengaruhi orang yang sulit membuat keputusan dan sekaligus mematahkan semangat lawan.

Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal baik secara meluas dalam masyarakat. Ada orang baik, yang memiliki kinerja tinggi dalam bidang yang ada hubungannya dengan jabatan publik yang ingin dicapai, tapi karena tidak ada yang memperkenalkan menjadi tidak elektabel. Sebaliknya, orang yang berprestasi tinggi dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan

⁴² Mangkubumi. *Kerangka dan Konsepsi Politik Indonesia: Sebuah Tinjauan dan Analisa Perkembangan Politik Nasional Indonesia*. (Yogyakarta: PT. Mitra Gama Widya, 2011), hal. 53

jabatan publik, boleh jadi mempunyai elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat.⁴³

Dalam masyarakat, sering diartikan, orang yang populer dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebaliknya, seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi adalah orang yang populer. Popularitas dan elektabilitas tidak selalu berjalan seiring. Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal baik secara meluas dalam masyarakat. Ada orang baik, yang memiliki kinerja tinggi dalam bidang yang ada hubungannya dengan jabatan publik yang ingin dicapai, tapi karena tidak ada yang memperkenalkan menjadi tidak elektabel. Sebaliknya, orang yang berprestasi tinggi dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan jabatan publik, boleh jadi mempunyai elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat.⁴⁴

2. Jenis-Jenis Elektabilitas

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga

⁴³ *Ibid*, h 50.

⁴⁴ Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, h. 35.

populer. Sedangkan popularitas adalah tingkat keterkenalan di mata publik.⁴⁵

Meskipun populer belum tentu layak dipilih. Sebaliknya meskipun punya elektabilitas sehingga layak dipilih tapi karena tidak diketahui publik, maka rakyat tidak memilih. Untuk meningkatkan elektabilitas maka sangat tergantung pada teknik kampanye yang dipergunakan. Dalam masyarakat yang belum berkembang, kecocokan profesi tidak menjadi persoalan. Yang perlu diingat, tidak semua kampanye berhasil meningkatkan elektabilitas. Ada kampanye yang menyentuh, ada kampanye yang tidak menyentuh kepentingan rakyat. Sementara itu ada kampanye yang berkedok sebagai survei, dengan tujuan untuk mempengaruhi orang yang sulit membuat keputusan dan sekaligus mematahkan semangat lawan.

3. Faktor yang Mempengaruhi Elektabilitas

Elektabilitas dapat diukur melalui citranya, sehingga pembahasan mengenai elektabilitas dan citra politik ini dianggap relevan. Elektabilitas Dalam dunia politik terdapat konsep mengenai elektabilitas. Maka, sosok atau institusi yang elektabilitas adalah sosok/institusi yang mendapatkan simpati dan empati dari banyak orang, sehingga orang banyak berkeinginan untuk memilih atau bahkan memilikinya. Popularitas lebih banyak berhubungan dengan dikenalnya seseorang, baik dalam arti positif, ataupun negatif. Dalam masyarakat, sering diartikan, orang yang populer dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebaliknya, seorang yang

⁴⁵ *Ibid*, h .36.

mempunyai elektabilitas tinggi 139 adalah orang yang populer. Memang kedua konstataasi ini ada benarnya. Tapi tidak selalu demikian. Popularitas dan elektabilitas tidak selalu berjalan seiring. Adakalanya berbalikan.

Elektabilitas dijadikan tolok ukur utama suatu keberhasilan, orang atau instansi yang berkualitas tetapi tidak berada dalam lingkaran kekuasaan pun menjadi tersisih. Sebaliknya, mereka yang berada dalam posisi pusat perhatian akan menjadi rebutan. Kondisi ini disuburkan oleh kondisi dan karakteristik masyarakat Indonesia yang sebagian besar belum sadar politik dan berpendidikan rendah serta rendahnya partisipasi politik masyarakat. Ada beberapa indikator utama yang membuat seorang figur dikatakan populer, antara lain, sedang menduduki posisi strategis, sering muncul di berbagai media massa, dan citranya positif dengan karakter dan sikap yang kuat. Pemerintah atau institusi yang berelektabilitas, dengan sendirinya diterima dan didukung oleh mayoritas rakyat, karena mereka mengenal tokohnya secara perseorangan dan mempercayainya secara keseluruhan, bahwa nilai dan kepentingan mereka akan terlindungi serta terpenuhi.

Pemerintah dipercaya mampu secara politis dan teknis untuk menangani masalah. Maka, pemerintah menjadi kuat dan berwibawa. Kuat, berarti punya dukungan luas. Berwibawa, berarti diikuti rakyat keputusan atau kebijaksanaannya. Pada gilirannya, dukungan dan wibawa itu mempengaruhi sikap rakyat terhadap cara dan hasil kerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dampaknya kepada penyelesaian masalah kehidupan yang sedang dan akan dihadapinya. Pemerintah yang

populer, tetap saja didukung rakyat, sekalipun pelaksanaan tugasnya belum atau tidak cukup berhasil memenuhi nilai dan kepentingan rakyat pendukungnya. Rakyat bersedia menunggu hasil pemecahan masalah yang dijanjikan pemerintah.

Elektabilitas tinggi tidak akan berarti apaapa kalau tidak ada faktor pendukung lain. Dukungan partai, data survei internal partai, serta kebijakan partai yang secara hierarki umumnya harus ditentukan oleh keputusan pengurus di tingkat pusat masingmasing partai. Bila kita memaknai beberapa pengertian elektabilitas yang tertera diatas maka dapat dibuat suatu asumsi bahwa elektabilitas meliputi: perilaku, pribadi, sikap dan persepsi. Perilaku berkaitan dengan tindakan–tindakan yang dilakukan, sedangkan pribadi dan sikap berkaitan dengan perasaan dan emosi, dan persepsi berkaitan dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Olehnya itu tingkat elektabilitas dapat diukur dengan memperhatikan unsur pengetahuan ,sikap dan dukungan yang dimiliki oleh kahalayak.

BAB III

PASANGAN CALON MUSTAFA DAN PROSES OTT

A. Identifikasi Reputasi Mustafa

Berlatar belakang pengusaha, Mustafa terjun ke panggung politik. Ia berhasil menjadi Bupati Lampung Tengah dan maju sebagai calon Gubernur Lampung, namun pencalonannya tersandung KPK. Mustafa lahir di Lampung Tengah, 27 Juli 1975. Sebelum dilantik sebagai bupati, ia pernah menjabat sebagai wakil Bupati Lampung Tengah. Ia adalah sosok pengusaha yang terjun ke dunia politik. Selain aktif di KADIN Lampung, ia juga aktif di Partai Golkar. Bersama partai beringin ini, Mustafa menjadi wakil dan naik menjadi Bupati Lampung Tengah.

Mustafa dikenal sebagai salah satu politikus mumpuni. Setelah sempat bergabung dengan Partai Golkar, selanjutnya Mustafa hijrah ke Partai NasDem. Pada April 2016, ia diangkat sebagai Ketua DPW NasDem Lampung. Saat menjadi Bupati Lampung Tengah, Mustafa dikenal dengan julukan Bupati Ronda. Karena dalam programnya Mustafa sering menyerukan program ronda kepada warganya. Mustafa juga suka berkeliling daerah pada malam hari untuk mengunjungi pos-pos ronda di Lampung Tengah.

Selain itu, Mustafa juga mendapat julukan Bupati Kece yang merupakan singkatan dari Kampung Ekonomi Creative. Slogan ini diperkenalkan Mustafa bersama Timnya hingga lambat laun munculah jargon Bupati Kece, Lampung Tengah Kece. Setelah menjabat selama 2 tahun, Mustafa pun maju mencalonkan dirinya sebagai Gubernur Lampung dengan wakil Ahmad Jajuli.

Secara umum jenjang karir musatfa adalah sebagai berikut

- a. Wakil Bupati Lampung Tengah (-2015)
- b. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Lampung (-2016)
- c. Bupati Lampung Tengah (2016-)
- d. Ketua Golkar Lampung Tengah (-2016)
- e. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah NasDem Lampung (2016-2018)

B. Proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Mustafa

Mustafa terjerat kasus dugaan suap terhadap DPRD Lampung Tengah terkait pinjaman daerah untuk APBD tahun anggaran 2018. Sebelum dirinya ditangkap, pada tanggal 15 Februari pihak KPK telah mengamankan ajudan Mustafa. Lalu pada pukul 6 petang, Mustafa pun ikut diamankan. Mereka berdua diantar ke kantor KPK di Jakarta lewat jalur udara. Setelah melakukan pemeriksaan secara mendalam, maka pada 16 Februari Mustafa ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari. Ia juga mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPW NasDem Lampung. Tidak hanya itu, statusnya sebagai tersangka juga membuat nasibnya terancam dalam pemilihan gubernur Lampung pada Juni 2018.

Awal kasus ini muncul melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Februari 2018. Saat itu KPK menangkap anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang kemudian berkembang dengan menjerat Mustafa sebagai pemberi suap. Mustafa menyuap para wakil rakyat itu untuk menyetujui pinjaman daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pinjaman yang direncanakan Rp 300 miliar untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah.

Mustafa menjalani persidangan hingga menghadapi putusan yang dibacakan pada Juli 2018. Mustafa terbukti bersalah menyuap anggota DPRD dan dijebloskan ke bui dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan serta pencabutan hak politik selama 2 tahun. Waktu bergulir. Mustafa lagi-lagi menjadi tersangka KPK meski belum tuntas menjalani hukumannya itu. Kali ini KPK menduga Mustafa menerima *fee* dari ijon proyek di Dinas Bina Marga Pemkab Lampung Tengah dengan kisaran *fee* 10-20 persen dari nilai proyek. Total gratifikasi yang diterima Mustafa setidaknya Rp 95 miliar.

Berdasarkan catatan penerimaan dan pengeluaran, uang senilai Rp 95 miliar tersebut diperoleh pada kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dan dipergunakan untuk kepentingan MUS (Mustafa). Sebagian dari uang itu atau setidaknya menurut KPK sebesar Rp 12,5 miliar dialirkan Mustafa ke anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Uang yang disebut KPK diberikan untuk pengesahan APBD-P hingga APBD Kabupaten Lampung Tengah.

KPK menetapkan Bupati Lamteng periode 2016-2021, Mustafa, sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait sejumlah pengadaan barang dan jasa atau proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Pemkab Lamteng tahun anggaran 2018 serta penerimaan-penerimaan lainnya (gratifikasi). Mustafa diduga menerima *fee* dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran *fee* sebesar 10-20% dari nilai proyek. KPK menduga tersangka Mustafa menerima suap dan gratifikasi sekitar Rp95 miliar dan yang bersangkutan tidak melaporkannya kepada kepada Direktorat Gratifikasi KPK.

Berdasarkan catatan penerimaan dan pengeluaran, uang sekitar Rp95 miliar tersebut diterima dalam rentang waktu bulan Mei 2017 hingga Februari 2018 dan

dipergunakan untuk kepentingan tersangka Mustafa. Adapun rincian penerimaan Mustafa yakni sebesar Rp58,6 miliar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan dan Rp36,4 miliar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan. Uang sekitar Rp95 miliar di antaranya Rp12,5 miliar dari pemilik PT Sorento Nusantara, Budi Winarto alias Awi dan dari pemilik PT Purna Arena Yudha, Simon Susilo. Uang itu kemudian diberikan Mustafa kepada Anggota DPRD Kabupaten Lamteng. KPK menetapkan Budi Winarto (BW) dan Simon Susilo (SS) sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap Bupati Lampung Tengah (Lamteng) periode 2016-2016, Mustafa (MUS).

Budi Winarto diduga menyuap Mustafa sejumlah Rp5 miliar terkait ijon proyek paket pekerjaan ruas jalan di Kabupaten Lamteng senilai Rp40 miliar. Sedangkan Simon Susilo memberikan uang sejumlah Rp7,5 miliar kepada Mustafda atas *fee* 10% untuk ijon 2 proyek paket pekerjaan peningkatan jalan di Kabupaten Lamteng senilai Rp76 miliar. KPK menyangka Budi Winarto dan Simon Susilo melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun uang Rp12,5 miliar dari dua bos di atas diberikan kepada sejumlah anggota DPRD Lamteng. Tujuannya untuk memuluskan pengesahan APBD Kabupaten Lamteng tahun anggaran 2017 sejumlah Rp1,825 miliar, pengesahan APBD Kabupaten Lamteng tahun 2018 sebesar Rp9 miliar, dan Rp1 miliar untuk pengesahan pinjaman Pemkab Lamteng kepada perusahaan daerah PT SMI.

KPK menyangka Mustafa selaku penerima suap dan gratifikasi melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP. Terkait kasus ini, KPK juga menetapkan Ketua DPRD Lamteng periode 2014-2019, Achmad Junaidi S (AJ); dan 3 orang anggota DPRD Lamteng periode yang sama, yakni Bunyana (BUN), Raden Zugiri (RZ), dan Zainudin (ZAI) sebagai tersangka. Bunyana (BUN), Raden Zugiri (RZ), dan Zainudin (ZAI) diduga menerima suap terkait persejutuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Lamteng. Kemudian, terkait pengesahan APBD Lamteng tahun anggaran 2017 dan pengesahan APBD Kabupaten Lamteng tahun anggaran 2018. KPK menyangka keempat anggota dewan di atas melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Lampung Tengah, Mustafa terkait dugaan kasus suap. Mustafa ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Mustafa sebelumnya telah menjalani serangkaian pemeriksaan intensif sejak Keluar mengenakan rompi oranye dan berpeci hitam, Mustafa tampak tenang ketika memberikan keterangan kepada awak media.

Mustafa berpesan kepada masyarakat Lampung Tengah, khususnya para pendukung dan simpatisan di Pilgub Lampung 2018 untuk bersabar. Sebagai informasi, Mustafa merupakan salah satu calon Gubernur Lampung yang

berpasangan dengan Helmi Hasan. Menurut Mustafa, apa yang dirasakannya saat ini merupakan cobaan yang harus tetap dijalani dengan sabar. Sebab, OTT lembaga antirasuah semata-mata untuk membersihkan perkara kasus korupsi di Indonesia. Meski demikian, Mustafa enggan menjelaskan secara detail terkait kasus dugaan suap di DPRD Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Terutama berkaitan soal peminjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar.

Terkait status penahanan yang ditetapkan oleh Mustafa, hingga saat ini pihak KPK belum mengonfirmasi hal tersebut. Meski demikian, KPK telah menaikkan status kasus Bupati Lampung Tengah itu menjadi penyidikan. Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Lampung Tengah. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan Rusliyanti, serta Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Taufik Rahman. Kasus ini berkaitan dengan permintaan agar DPRD Lampung Tengah menyetujui pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar. Rencananya, uang itu akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR Lampung Tengah. Adapun J Natalis Sinaga dan Rusliyanti diduga menerima suap untuk memberikan persetujuan DPRD atas pinjaman daerah pada APBD Lampung Tengah kepada PT SMI. Sementara pihak diduga pemberi suap adalah Taufik Rahman.

Faktor pengendalian internal menjadi kunci mengatasi potensi tindak pidana korupsi di daerah. Jika kepala daerah sudah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, maka dipastikan yang bersangkutan tidak berkomitmen dalam

menjaga sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan bagian fondasi dari pengawasan sistem antikorupsi. Sementara itu, fondasi kedua adalah individu pelaku pemerintahan. Jika pimpinan sudah tertangkap dalam OTT, maka membuktikan dia sudah mengingkari sistem pengendalian internal dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (di daerahnya).

Pimpinan daerah adalah elemen pertama dalam pengendalian internal. Kepala daerah bertugas mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Risiko yang dimaksud termasuk soal area rawan korupsi. "Secara internal, dia memiliki wewenang menjalankan rambu-rambu yang membuat orang menjadi segan menyentuh area rawan korupsi. Elemen kedua dan ketiga adalah aturan dan sistem informasi dalam menyampaikan peraturan pengawasan internal. Dengan sosialisasi yang baik, akan mendukung iklim pengendalian yang baik. Elemen keempat adalah evaluasi pengendalian. Jika keempatnya sudah dilakukan, maka sistem pengendalian secara internal sudah berjalan.

Ada celah lain dalam memberikan gratifikasi bagi pejabat lewat proyek di daerah. Jika tidak ada pengawasan internal dari daerah, maka kontraktor memiliki kesempatan untuk menyusun harga perkiraan pembangunan proyek. Padahal, semestinya, daerah bisa menyusun berdasarkan harga perkiraan sendiri (HPS). Jika tidak, maka harga yang sudah diajukan kontraktor bisa jadi harga yang sudah tinggi. Berarti mereka punya biaya lebih sehingga lebih mudah melakukan gratifikasi. Karenanya, dia sepakat jika pemerintah akan memberkakan 50 persen materi antikorupsi dalam pelatihan kepala daerah. Arda juga berpendapat inspektorat daerah ikut mendukung upaya ini.

C. Penetapan Mustafa Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan eks Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka. Kali ini, penetapan status Mustafa itu berkaitan dengan kasus suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah tahun 2018. Penetapan tersangka kepada Mustafa itu merupakan pengembangan dari kasus suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun 2018 yang telah memvonis Mustafa tiga tahun penjara.

Penyidik membuka penyidikan baru dan menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Mus (Mustafa), Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021 sebagai tersangka, sejalan dengan peningkatan status perkara ke penyidikan. Mustafa diduga menerima *fee* dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga sebesar 10 persen hingga 20 persen dari nilai proyek. Dari berbagai proyek itu, total uang suap yang diterima Mustafa diduga mencapai Rp 95 miliar. Rincian sebesar Rp 58,6 miliar berasal dari 179 calon rekanan dan sebesar Rp 36,4 miliar berasal dari 56 calon rekanan.

Pada kasus ini, KPK juga turut menetapkan pemilik PT. Sorento Nusantara Budi Winarto dan pemilik PT Purna Arena Yudha Simon Susilo dalam kasus yang sama. Kedua pengusaha berperan sebagai penyuap Mustafa. Mustafa sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 KUHP. Sedangkan, Budi dan Simon selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal

5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat 1 ke 1 *Juncto* pasal 64 ayat 1 KUHP.

Maraknya kepala daerah yang tertangkap korupsi dalam waktu yang hampir berdekatan tersebut tidak hanya menyisakan kepiluan di masyarakat. Akan tetapi juga membuka ruang kepada kita untuk merefleksikan lebih dalam atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan Pilkada Serentak yang selama ini telah berlangsung. Dianggap memilukan karena OTT KPK yang menimpa empat kepala daerah tersebut menambah deretan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah pada masa sebelumnya.

Penyuapan memang menjadi modus korupsi paling banyak dilakukan karena modus ini tergolong paling mudah. Dengan memanfaatkan otoritas yang melekat pada jabatan yang dimilikinya, kepala daerah dapat menjanjikan jabatan ataupun proyek kepada swasta maupun bawahannya dengan imbalan suap seperti yang diinginkannya.

Banyaknya kepala daerah yang terseret kasus korupsi dalam waktu yang hampir berdekatan tersebut, salah satunya dikarenakan mereka membutuhkan biaya politik yang tinggi untuk pencalonannya kembali dalam Pilkada periode selanjutnya. Maka tidak heran jika beberapa waktu yang lalu, Ketua KPK, Agus Raharjo mengatakan bahwa terdapat 90 persen petahana yang berpotensi menjadi tersangka kasus korupsi.

Besarnya mahar politik yang diminta oleh partai politik tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan partai politik untuk menyiapkan diri pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun depan. Selain itu, biaya politik selama masa kampanye juga sangat membutuhkan modal yang tinggi. Di sinilah partai politik tidak

memainkan fungsinya dengan baik sebagai salah satu institusi demokrasi. Idealnya, mereka harus melakukan kaderisasi sekaligus seleksi politisi untuk dimenangkan dalam perebutan kursi jabatan publik. Dengan memenangkan kadernya, harapannya program-program khas partai tersebut dapat terimplementasikan melalui kebijakan publik. Tetapi yang terjadi, partai politik mereduksi perannya sebagai pedagang tiket kepada kandidat untuk memasuki arena kompetisi untuk menjadi kepala daerah. Tidak mengherankan jika banyak kepala daerah yang ingin maju kembali dalam Pilkada selanjutnya memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai jalur. Termasuk jalur ilegal dengan menerima suap dari para kontraktor yang mendapatkan proyek di wilayah otoritasnya. Oleh karena itu untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan Pilkada, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Penulis merekomendasikan agar partai politik untuk segera melakukan pembenahan di internal mereka. Termasuk sistem kaderisasi, pendanaan, dan strategi kemenangan yang mampu menekan biaya politik yang tinggi.

Kepada masyarakat secara luas untuk meningkatkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Partisipasi politik masyarakat jangan sampai hanya berhenti di bilik suara. Akan tetapi juga terus berjalan sampai pada proses perumusan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik. Salah satunya dapat dimulai dengan memaksimalkan kanal musrembang yang mengakomodasi proses perencanaan kebijakan publik secara partisipatif.

BAB IV

OPERASI TANGKAP TANGAN DAN ELEKTABILITAS MUSTAFA

A. Pengaruh Tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Elektabilitas Mustafa

Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta dan Lampung. Dalam operasi senyap tersebut, tim mengamankan 19 orang yang salah satunya adalah Bupati Lampung Tengah, Mustafa. KPK juga mengamankan ‘Selain Mustafa dan empat anak ‘J Natalius Sinaga ‘Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah da ‘RR ‘ZA ‘Rusliyanto ‘buahnya yaitun IK. Kemudian, tim juga mengamankan pihak lainnya yakni, Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman; Sekwan DPRD Lampung Tengah berinisial S; Kabid PUPR, ADR; kontraktor, N; dua pihak swasta A dan ADK; tiga PNS, K, SNW dan AAN; staf PUPR, I; serta satu ajudan dan dua sopir. Secara keseluruhan KPK mengamankan total 19 orang yang terdiri dari delapan orang diamankan di Jakarta, dan 11 orang di Bandar Lampung serta Lampung Tengah.

Pada awalnya, pada Rabu 14 Februari 2018, kemarin, KPK mengamankan 10 orang di Lampung Tengah. Tim mengamankan satu pihak swasta berinisial A di sebuah restoran sekira pukul 14.00 WIB. Kemudian, tim melanjutkan penangkapan terhadap seorang PNS berinial SNW di kediamannya. Saat dilakukan penangkapan terhadap SNW, KPK mengamankan uang sebesar Rp160 juta. Tim juga mengamankan Sekwan DPRD Lampung Tengah berinisial S di Bandara Lampung sekira pukul 17.00 WIB dan dilanjutkan penangkapan terhadap pihak swasta, ADK di rumahnya. Dari rumah ADK, tim mengamankan uang Rp1

miliar yang disimpan di kardus Tim mengamankan R bersama .dalam mobil CRV rekanya S di jalan dalam perjalanan ke Bandar Lampung. Dua orang lainnya yakni, N dan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, J. Natalius Sinaga masing-masing diamankan di kediamannya. Dalam penangkapan tersebut, tim juga membawa dua orang sopir. Total sepuluh orang tersebut kemudian dibawa ke Mapolda Lampung untuk menjalani pemeriksaan awal.

Sementara itu, tim KPK yang berada di Jakarta juga mengamankan delapan orang di dua lokasi yang berbeda. Pada lokasi pertama, tim mengamankan Taufik Rahman; AAN; ADR; I dan K, di sebuah Hotel. Kemudian, tim kembali mengamankan tiga orang lainnya yakni, Z, R, dan IK di hotel yang berbeda. Pada hari kedua, tim mengamankan Bupati Lampung Tengah, Mustafa dan ajudannya di Bandar Tim berkoordinasi dengan Polda Lampung dan sekitar pukul .Lampung .ersama timBupati Lampung Tengah sudah b ‘WIB ١٨.٢٠

Setelah dilakukan pemeriksaan, KPK akhirnya meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan dan ditetapkan tiga orang tersangka. Tiga tersangka tersebut yakni, anggota ‘Natalius Sinaga .J ‘Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah usliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten R ‘DPRD Lampung Tengah Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus .Taufik Rahman ‘Lampung Tengah dugaan suap terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung tahun 2018.s dilakukan masih haru ‘Mustafa ‘Sedangkan Bupati Lampung Tengah .Jakarta Selatan ‘pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK

Pasca penetapan tersangka oleh KPK disebabkan tuduhan suap, Mustafa yang merupakan calon gubernur Lampung dari partai NasDem, PKS dan Hanura sontak menjadi buah bibir masyarakat. Terlebih, meski telah ditetapkan sebagai

tersangka, informasi yang masih simpang siur membuat masyarakat bertanya-tanya. Pada Rabu Tanggal 14 Februari 2018, rombongan yang terdiri dari Mustafa, sopir, dan ajudan bertolak dari rumah KECE yang berlokasi di Enggal Bandar Lampung menuju Bandara Radin Intan sekitar pukul 16.00 WIB. Kedatangan Mustafa ke Jakarta ada dua tujuan, yakni cek kesehatan dan menghadiri penandatanganan MoU antara Pemkab Lampung Tengah dengan PT. SMI terkait pengajuan pinjaman ke Kementerian Keuangan pusat senilai Rp 300 miliar. Dana tersebut digadang-gadang untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah.

Setelah tiba di Jakarta, karena sakit tenggorokannya semakin parah Mustafa mendahului pergi ke rumah sakit Harapan Bunda di Jakarta untuk melakukan pengecekan kesehatan. Dan selesai berkisar pukul 22.00 WIB. Lalu rencana perjalanan dilanjutkan menuju Hotel Sahid, lokasi dimana akan dilakukan MoU antara PT. SMI dengan Pemkab Lampung Tengah. Belum tiba di hotel, sekitar pukul 22.20 WIB tiba-tiba sudah ramai soal OTT Kabupaten Lampung Tengah. Ada ratusan telfon yang masuk yang menanyakan OTT tersebut. Kami sendiri kaget begitu baca berita-berita yang beredar menuliskan Bupati Lampung Tengah OTT.

Terkait pemberitaan tersebut, selain menyayangkan karena sangat merugikan pihak Mustafa, Mofa menangkap adanya unsur kesengajaan atau pembusukan untuk mencoreng nama baik Mustafa. Upaya pembusukan nama Mustafa lewat media, kembali tercium ketika mencuat pemberitaan bahwa Mustafa ditangkap KPK. Sekali lagi, Mofa menegaskan, tidak ada penangkapan apapun yang dilakukan KPK. Dari keterangan Mofa, usai pemberitaan OTT, keesokan harinya

Mustafa sempat mengikuti apel siaga Polda-TNI hadapi Pilkada di Lapangan Saburai Bandar Lampung. Usai apel Mustafa dan tim kuasa hukumnya sempat melakukan konferensi pers menyanggah pemberitaan dirinya tertangkap OTT. Bahkan pada sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB, Mustafa masih sempat menghadiri undangan di Kampung Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Sebelum itu Mustafa juga sempat kondangan di Natar sekitar pukul 12.45 WIB, lalu menemui keluarganya di rumah Kedaton, lalu berkampanye. Orang yang terjerat masalah hukum tidak akan melakukan itu semua. Usai menghadiri undangan di Jati Agung, tim kuasa hukum menerima telfon dari KPK yang menyatakan perintah panggilan untuk Mustafa. Karena panggilan hanya dilakukan secara lisan, tim kuasa hukum sempat menolak panggilan yang diajukan KPK. Tapi ketika hal itu disampaikan kepada Mustafa, tim kuasa hukum justru terkejut karena Mustafa sendiri yang kemudian menawarkan diri untuk ke KPK.

Panggilan oleh KPK hanya dilakukan secara lisan, dengan asumsi mereka telah berkordinasi dengan Polda Lampung. Karena beliau merasa tidak bermasalah, akhirnya beliau sendiri yang menawarkan diri untuk klarifikasi ke KPK. Kami akhirnya bertolak ke Bandara Radin Intan sekitar pukul 18.00 WIB. Sebelum berangkat ke Jakarta, Polda Lampung dan utusan KPK sempat melakukan BAP di bandara³

Faka tersebut, lanjut Mofa, juga menjadi bukti bahwa Mustafa berangkat ke KPK atas inisiatifnya sendiri. Hal ini jauh berbeda dengan pemberitaan yang beredar yang menyatakan bahwa Mustafa ditangkap oleh KPK. Saksi lainnya diungkapkan langsung oleh istri Mustafa, Nessy Kalviya. Ia membantah bahwa suaminya ditangkap KPK, tetapi justru menyerahkan diri karena ingin membantu

KPK, meski akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan Nussy sendiri mengaku dialah yang mempersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan suaminya selama menyelesaikan permasalahan di KPK.

Sementara jika ditarik dari aspek hukum, belum konstruksi hukum yang menjadi landasan KPK hingga akhirnya menetapkan Mustafa sebagai tersangka. Adanya permintaan uang dari anggota dewan untuk memuluskan pengajuan pinjaman, ini menempatkan Mustafa sebagai korban.

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti diperoleh hasil bahwa sebelum terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Mustafa sebagai calon Gubernur Lampung periode 2019-2024 terlihat bahwa berdasarkan survei Charta Politika Indonesia menyelenggarakan survei preferensi politik masyarakat Lampung menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur setempat periode 2019-2024. Hasilnya calon gubernur Lampung M Ridho Ficardo memiliki elektabilitas tertinggi. Elektabilitas pasangan, M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri tertinggi dengan memperoleh 35,1 persen, disusul Herman HN-Sutono dengan 26,3 persen, Arinal-Nunik 13,1 persen, dan Mustafa-Ahmad Jajuli 11,3 persen, serta menyatakan tidak tahu mencapai 14,2 persen.

Berdasarkan Putusan Nomor 117/DKPP-PKE-VII/2018 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia ditetapkan bahwa menurut Rakata *Institute* telah melakukan survei Pilgub Lampung pada tanggal 2-7 April 2018 dengan menggunakan metode *stratified random sampling* dengan tingkat kepercayaan 95% dan *margin of error* $\pm 3,10\%$. Hasil survei Rakata *Institute* ini dirilis pada tanggal 12 April 2018 dan menunjukkan bahwa

pasangan calon Arinal Djunaidi-Chusnunia mendapat elektabilitas tertinggi 24,60% diikuti paslon Herman HN-Sutono 23,70%, kemudian paslon petahana M. Ridho Ficardo-Bachtar Basri memperoleh 19,50% dan disusul paslon Mustafa-Ahmad Jajuli yang memperoleh 8,20%, *swing voters* masih terdapat sebanyak 24,00%. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada kandidat yang mampu mendominasi elektabilitas suara hingga periode survei tersebut dilakukan.

Seperti yang dikemukakan oleh Mirseptowi selaku Sekretaris KPU Lampung Tengah menyatakan bahwa:

Elektabilitas Paslon Nomor 4 (Mustafa-Jajuli) setelah adanya OTT memang menurun drastis, hal ini disebabkan oleh menurunnya kepercayaan masyarakat pada calon kepala daerah yang bermasalah dengan hukum, dan hal ini sangat wajar terjadi pada setiap pemilihan kepala daerah di manapun karena baik buruknya calon kepala daerah yang akan bertarung dalam suatu kompetensi dipengaruhi oleh tindakan dan sikap yang ada. Jadi wajar saja jika elektabilitas Paslon Nomor 4 (Mustafa-Jajuli) menurun terutama sebelumnya banyak yang mendukung Paslon Nomor 4 (Mustafa-Jajuli) tersebut.⁴⁶

Seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Silahuddin selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah:

Saya rasa elektabilitas Paslon Nomor 4 (Mustafa-Jajuli) yang terkena OTT memang menurun, hal ini terkait dengan kepercayaan pada calon kepala daerah yang terkena masalah apalagi masalah korupsi.⁴⁷
Seperti yang dikemukakan oleh Imawati selaku perwakilan masyarakat Bandar

Jaya Kabupaten Lampung Tengah:

Memang elektabilitas Paslon Nomor 4 (Mustafa-Jajuli) yang terkena kasus OTT oleh KPK saya dengar dan rasakan menurun, karena jelas memang sangat berpengaruh apa yang dilakukan calon pemimpinnya dengan kepercayaan masyarakat. Sebelum OTT sebenarnya Paslon Nomor 4 (Mustafa-Jajuli) mempunyai suara yang cukup banyak dan mampu mengalahkan elektabilitas calon lain, namun menurun akibat adanya OTT.⁴⁸

⁴⁶ Wawancara dengan Mirseptowi selaku Sekretaris KPU Lampung Tengah, , Tanggal 11 Juli 2019, Pukul 13.21 WIB.

⁴⁷ Wawancara dengan Ahmad Silahuddin selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 12 Juli 2019, Pukul 09.30 WIB.

⁴⁸ Wawancara dengan Imawati selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 12 Juli 2019, Pukul 10.10 WIB.

Seperti yang dikemukakan oleh Indah Ratna Dewi selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah:

Sangat jelas elektabilitas Paslon Nomor 4 (Mustafa-Jajuli) yang terkena kasus OTT oleh KPK menurun dan berpengaruh terhadap peroleh suara pendukungnya.⁴⁹

Seperti yang dikemukakan oleh Mariani selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah:

Saya rasa memang sudah sangat jelas elektabilitas Paslon Nomor 4 (Mustafa-Jajuli) yang terkena kasus OTT oleh KPK menurun dan berpengaruh terhadap peroleh suara pendukungnya, padahal sebelumnya suara mereka cukup baik dan mengalahkan calon-calon lainnya, sangat disayangkan sekali sebenarnya.⁵⁰

Seperti yang dikemukakan oleh Dewi selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah:

Menurut saya elektabilitas Paslon Nomor 4 (Mustafa-Jajuli) yang terkena kasus OTT oleh KPK jelas akan menurun dan para calon pemilih akan memilih calon lainnya.⁵¹

Seperti yang dikemukakan oleh Amron selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah:

Elektabilitas Paslon Nomor 4 (Mustafa-Jajuli) yang pasti akan menurun dengan adanya kasus OTT oleh KPK.⁵²

Charta Politika telah merilis hasil survei Pilgub Lampung pada tanggal 20 Maret 2018 yang merupakan hasil survei 6-11 Maret 2018 dengan menggunakan 800 responden, *margin of error* $\pm 3,46\%$ dan tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil survei tersebut elektabilitas tertinggi diperoleh paslon petahana M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri sebesar 35,1%, disusul paslon Herman HN-

⁴⁹ Wawancara dengan Indah Ratna Dewi selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 13 Juli 2019, Pukul 12.12 WIB.

⁵⁰ Wawancara dengan Mariani selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 13 Juli 2019, Pukul 14.05 WIB.

⁵¹ Wawancara dengan Dewi selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 13 Juli 2019, Pukul 14.05 WIB.

⁵² Wawancara dengan Amron selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 13 Juli 2019, Pukul 14.05 WIB.

Sutono sebesar 26,3%, diikuti paslon Arinal Djunaidi-Chusnunia dengan 13,1% dan terakhir ditempati paslon Mustafa-Ahmad Jajuli 11,3%, sedangkan sebanyak 14,2% responden menjawab tidak tahu.

Berikutnya pada tanggal 25 Maret 2018, lembaga survei lainnya Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) juga merilis hasil surveinya yang menempatkan M. Ridho Ficardo sebagai kandidat yang mendapat dukungan terbanyak sebanyak 32,5%, diikuti Herman HN 22,2%, Mustafa 13,4 %, dan Arinal Djunaidi 11,6%. Massa mengambang berjumlah 16,9%. SMRC juga merilis dalam lima bulan terakhir (Oktober 2017 hingga Maret 2018) dukungan kepada M. Ridho Ficardo tidak begitu banyak berubah, diikuti Herman HN, sementara Mustafa turun cukup besar dan Arinal Djunaidi naik paling tinggi. Posisi ini dipandang SMRC membuat paslon petahana M. Ridho-Bachtiar Basri makin sulit dikejar karena persentase hasil survei cukup jauh dibandingkan paslon lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 19 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap untuk pinjaman APBD Lampung Tengah tahun 2018. Termasuk yang ditangkap Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa yang juga calon Gubernur Lampung. Berdasarkan konferensi pers di kantor KPK, Wakil Ketua KPK Laode Syarif menjelaskan kronologis jalannya penangkapan. Ia menyebut, pada Rabu, KPK mengamankan 10 orang di Lampung Tengah (Lamteng). Rinciannya sekitar pukul 14 WIB, mengamankan A di sebuah restoran di Lamteng. Lalu, NS di rumahnya pukul 15 WIB. Dari NS, KPK menyita barang bukti uang Rp160 juta. Selanjutnya, KPK mengamankan S di Bandar Lampung pukul 17 WIB. Selanjutnya giliran ADK ditangkap di rumahnya

pukul 18 WIB. KPK di sini menyita uang Rp1 miliar yang berada di mobil Honda CRV hitam milik ADK.

Pada pukul 18 WIB, R bersama rekannya S diamankan di jalan. Keduanya sedang dalam perjalanan ke Bandar Lampung dari Lamteng Sedangkan N diamankan di rumahnya di Lamteng. Lalu, Pukul 22 WIB, JSS ditangkap di rumahnya. Bersama delapan orang itu, tim KPK juga mengamankan dua orang sopir. Sepuluh orang tersebut pada Rabu malam dibawa ke Markas Polda Lampung untuk menjalani pemeriksaan awal. Selain Lampung, KPK juga melakukan penangkapan delapan orang di Jakarta. Mereka ditangkap di dua hotel berbeda di kawasan Jakarta Pusat sekitar pukul 17 WIB. Dari hotel pertama, 5 orang ditangkap yakni TR, AAN, ADR, I, dan K. Sementara di hotel kedua ada tiga orang yang ditangkap yakni Z, R, dan IK. KPK mengamankan ajudan Bupati Lampung Tengah pada pukul 15. Setelah koordinasi dengan Polda Lampung, jam 18.20 WIB Bupati Lamteng sudah bersama tim dan dilakukan pemeriksaan awal, dan malam ini dibawa ke kantor KPK. Selain uang Rp1 miliar dan Rp160 juta, tim juga mengamankan sejumlah dokumen terkait persetujuan pinjaman daerah.

Tiga tersangka yang sudah ditetapkan KPK dalam kasus ini ialah TR, Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah selaku pihak pemberi. Lalu sebagai penerima yakni JNS, Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, dan RUS, anggota DPRD Lampung Tengah. Mustafa nonaktif sebagai Bupati Lampung Tengah karena mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung untuk Pilgub 2018. Jabatannya kemudian diisi Wakil Bupati Loekman Djoyosoemarto selaku pelaksana tugas Bupati Lampung Tengah. Maju pilgub, Mustafa berpasangan dengan anggota DPD RI asal Lampung Ahmad Jajuli. Pasangan ini diusung oleh koalisi tiga

parpol yakni Partai NasDem, PKS dan Hanura. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa memengaruhi tingkat elektabilitasnya sebagai Calon Gubernur (Cagub) Lampung. Bahkan, mantan Ketua Partai NasDem Lampung itu kehilangan basis massa di wilayah yang dipimpinnya, yakni Lampung Tengah.

Seperti yang dikemukakan oleh Mirseptowi selaku Sekretaris KPU Lampung Tengah menyatakan bahwa:

Saya rasa elektabilitas Paslon Nomor 4 (Mustafa-Jajuli) setelah adanya OTT memang menurun drastis, hal ini disebabkan oleh menurunnya kepercayaan masyarakat pada calon kepala daerah yang bermasalah dengan hukum, dan hal ini sangat wajar terjadi pada setiap pemilihan kepala daerah di manapun karena baik buruknya calon kepala daerah yang akan bertarung dalam suatu kompetensi dipengaruhi oleh tindakan dan sikap yang ada. Jadi wajar saja jika elektabilitas Paslon Nomor 4 (Mustafa-Jajuli) menurun terutama sebelumnya banyak yang mendukung Paslon Nomor 4 (Mustafa-Jajuli) tersebut.⁵³

Seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Silahuddin selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah:

Menurut saya elektabilitas Paslon Nomor 4 (Mustafa-Jajuli) yang terkena OTT memang menurun, hal ini terkait dengan kepercayaan pada calon kepala daerah yang terkena masalah apalagi masalah korupsi.⁵⁴

Seperti yang dikemukakan oleh Imawati selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah:

Memang benar elektabilitas Paslon Nomor 4 (Mustafa-Jajuli) yang terkena kasus OTT oleh KPK saya dengar dan rasakan menurun, karena jelas memang sangat berpengaruh apa yang dilakukan calon pemimpinnya dengan kepercayaan masyarakat. Sebelum OTT sebenarnya Paslon Nomor 4 (Mustafa-Jajuli) mempunyai suara yang cukup banyak dan mampu mengalahkan elektabilitas calon lain, namun menurun akibat adanya OTT.⁵⁵

⁵³ Wawancara dengan Mirseptowi selaku Sekretaris KPU Lampung Tengah, , Tanggal 11 Juli 2019, Pukul 13.21 WIB.

⁵⁴ Wawancara dengan Ahmad Silahuddin selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 12 Juli 2019, Pukul 09.30 WIB.

⁵⁵ Wawancara dengan Imawati selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 12 Juli 2019, Pukul 10.10 WIB.

Seperti yang dikemukakan oleh Indah Ratna Dewi selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah:

Menurut pendapat saya Sangat jelas elektabilitas Paslon Nomor 4 (Mustafa-Jajuli) yang terkena kasus OTT oleh KPK menurun dan berpengaruh terhadap peroleh suara pendukungnya.⁵⁶

Seperti yang dikemukakan oleh Mariani selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah:

Saya rasa memang sudah sangat jelas elektabilitas Paslon Nomor 4 (Mustafa-Jajuli) yang terkena kasus OTT oleh KPK menurun dan berpengaruh terhadap peroleh suara pendukungnya, padahal sebelumnya suara mereka cukup baik dan mengalahkan calon-calon lainnya, sangat disayangkan sekali sebenarnya.⁵⁷

Seperti yang dikemukakan oleh Dewi selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah:

Menurut saya elektabilitas Paslon Nomor 4 (Mustafa-Jajuli) yang terkena kasus OTT oleh KPK jelas akan menurun dan para calon pemilih akan memilih calon lainnya karena paslon Nomor 4 pasti gugur dalam Pilgub.⁵⁸
Seperti yang dikemukakan oleh Amron selaku perwakilan masyarakat Bandar

Jaya Kabupaten Lampung Tengah:

Elektabilitas Paslon Nomor 4 (Mustafa-Jajuli) yang pasti akan menurun dengan adanya kasus OTT oleh KPK. Semua pasti berpengaruh karena adanya OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Paslon Nomor 4 (Mustafa-Jajuli).⁵⁹

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika, saat merilis hasil survei elektabilitas cagub-cawagub Lampung di Ruang Dragon Hotel Horison, Bandar Lampung pada Selasa. Lampung Tengah sudah dikuasai (cagub petahana) M Ridho Ficardo. Kasus OTT ini menggerogoti

⁵⁶ Wawancara dengan Indah Ratna Dewi selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 13 Juli 2019, Pukul 12.12 WIB.

⁵⁷ Wawancara dengan Mariani selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 13 Juli 2019, Pukul 14.05 WIB.

⁵⁸ Wawancara dengan Dewi selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 13 Juli 2019, Pukul 14.05 WIB.

⁵⁹ Wawancara dengan Amron selaku perwakilan masyarakat Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 13 Juli 2019, Pukul 14.05 WIB.

basis massa Mustafa. Yunarto mengatakan, berdasar hasil survei Charta Politika, sebanyak 71,3% responden mengetahui kasus OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Mustafa. Kemudian, 15,1% responden tidak mengetahui, serta 13,6% responden tidak menjawab. Sebanyak 65,5% responden mengatakan kasus tersebut menjadi pertimbangan dalam memilih, dan hanya 10,1% mengatakan tidak menjadi pertimbangan. Lalu, sekitar 24,4% belum menjawab.

Bila dibandingkan dengan survei empat bulan lalu, elektabilitas Mustafa turun setengahnya. Saat ini, elektabilitas Mustafa untuk survei elektabilitas terbuka hanya 10,4%. Begitu juga dengan hasil survei elektabilitas dengan menyodorkan nama magub, Mustafa masih posisi terakhir, yakni 11,6%. Secara berpasangan, elektabilitas Mustafa-Ahmad Jajuli hanya 11,3%.

Implikasi hukum terhadap pasangan calon kepala daerah terpilih yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (terbaru) tidak ada ketentuan yang mengatur jika calon kepala daerah terpilih ditetapkan menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sebagaimana diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016. Kesemuanya itu hanya mengatur mengenai implikasi hukum apabila kepala daerah kemudian berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Pasal 58 huruf F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 hanya mengatur tentang syarat bahwa calon kepala daerah tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 5 (lima) tahun. Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian memberikan penafsiran, pasal tersebut tidak berlaku bagi mereka yang melakukan tindak pidana politik dan perkara kealpaan ringan. Kemudian Pasal 97 ayat (1) PP No. 49 Tahun 2008, yang membuat kepala daerah terpilih tidak dilantik adalah jika ia berhalangan tetap. Jika calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah. Akan tetapi tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “berhalangan tetap”. Bagi calon kepala daerah terpilih yang menang dalam Pilkada dapat dilakukan pelantikan karena status sebagai tersangka dianggap bukan “halangan tetap”.

Ditetapkannya calon kepala daerah terpilih kemudian menjadi tersangka selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan ia terbukti bersalah, tidak serta merta membuat statusnya sebagai calon kepala daerah terpilih dicabut. Tersangka, tetap dapat menjadi calon kepala daerah terpilih karena status tersangka adalah status “berhalangan sementara” dan belum dijatuhi putusan/vonis pengadilan/hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam persyaratan calon kepala daerah yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa calon kepala daerah tidak boleh berstatus sebagai tersangka, tetapi yang dipersyaratkan adalah calon kepala daerah tidak pernah sebagai terpidana atau jika menjadi mantan

terpidana harus secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Sehingga calon kepala daerah terpilih yang berstatus sebagai tersangka masih sah sebagai calon kepala daerah terpilih.

Operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lampung Tengah nonaktif Mustafa mempengaruhi tingkat elektabilitasnya sebagai Calon Gubernur (Cagub) Lampung. Hasil survei Charta Politika, sebanyak 71,3% responden mengetahui kasus OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Mustafa. Kemudian, 15,1% responden tidak mengetahui, serta 13,6% responden tidak menjawab. Sebanyak 65,5% responden mengatakan kasus tersebut menjadi pertimbangan dalam memilih, dan hanya 10,1% mengatakan tidak menjadi pertimbangan. Lalu, sekitar 24,4% belum menjawab. bila dibandingkan dengan survei empat bulan lalu, elektabilitas Mustafa turun setengahnya. Saat ini, elektabilitas Mustafa untuk survei elektabilitas terbuka hanya 10,4%. Begitu juga dengan hasil survei elektabilitas dengan menyodorkan nama magub, Mustafa masih posisi terakhir, yakni 11,6%. Secara berpasangan, elektabilitas Mustafa-Ahmad Jajuli hanya 11,3%.

Berbeda halnya dengan calon kepala daerah terpilih yang berstatus terdakwa maka tetap dapat menjadi calon kepala daerah terpilih jika tuntutan pidana yang diberikan kepadanya tidak lebih dari 5 tahun hukuman penjara dan karena belum dijatuhi putusan/ vonis pengadilan/ hakim. Dalam pasal 124 PP No. 6 Tahun 2005 mengatur bahwa Kepala daerah dapat diberhentikan sementara jika dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer.

Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal baik secara meluas dalam masyarakat. Ada orang baik, yang memiliki kinerja tinggi dalam bidang yang ada hubungannya dengan jabatan publik yang ingin dicapai, tapi karena tidak ada yang memperkenalkan menjadi tidak elektabel. Sebaliknya, orang yang berprestasi tinggi dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan jabatan publik, boleh jadi mempunyai elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat.

Dalam masyarakat, sering diartikan, orang yang populer dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebaliknya, seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi adalah orang yang populer. Popularitas dan elektabilitas tidak selalu berjalan seiring. Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal baik secara meluas dalam masyarakat. Ada orang baik, yang memiliki kinerja tinggi dalam bidang yang ada hubungannya dengan jabatan publik yang ingin dicapai, tapi karena tidak ada yang memperkenalkan menjadi tidak elektabel. Sebaliknya, orang yang berprestasi tinggi dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan jabatan publik, boleh jadi mempunyai elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat.

Partai politik yang seharusnya menjadi instrumen untuk menilai calon yang paling baik bagi masyarakat. Cenderung lebih mementingkan calon-calon yang royal kepada atasan daripada calon di luar partai yang memungkinkan dianggap masyarakat lebih berkualitas dan pantas menjadi kepala daerah.

Elektabilitas sebagai pemimpin sangat penting fungsinya. Elektabilitas adalah ukuran/tingkat keterpilihan. Ukuran keterpilihan yang dimaksud adalah sejauh mana peluang seseorang dapat dipilih untuk memimpin suatu komunitas dalam regional wilayah tertentu. Hal ini akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan. Tetapi dalam hal ini perlu digaris bawahi bahwa elektabilitas yang dimaksudkan adalah elektabilitas yang didapatkan dengan bukti nyata dan kepercayaan dari masyarakat. Elektabilitas dari pemimpin yang memiliki integritas bukan pemimpin instan. Jika elektabilitas yang seperti ini sudah dimiliki maka akan mudah dalam memimpin. Rakyat yang sudah mengenal dan percaya akan dengan sangat senang hati mengikuti keinginan pemimpinnya. Dampaknya adalah program-program akan mudah terlaksana karena orang-orang yang dipimpin akan memberikan dukungan.

Di Indonesia saat ini, sebagian rakyat tidak lagi percaya pada pemimpinnya, bahkan mereka tidak tahu siapa pemimpinnya. Kebanyakan pemimpin di negeri ini membangun elektabilitas dengan cara yang instan. Memperkenalkan diri hanya pada saat kampanye, bahkan sampai memberikan sejumlah uang sebagai pemikat di atas janji-janji saat kampanye demi kepentingan rakyat agar dipilih pada saat pemilihan umum. Rakyat hanya tahu pemimpinnya dari foto-foto dan baliho yang disebar sepanjang jalan. Pemimpin yang seperti ini biasanya harus

mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk meraih elektabilitas. Hasilnya mereka tidak tahu bagaimana cara memimpin yang baik. Pemimpin yang seperti ini tidak akan memikirkan rakyat yang dipimpinnya, sehingga rakyat pun tidak kenal dengan pemimpinnya dan tidak akan mengikuti apa yang diinginkan oleh pemimpinnya.

Upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan pasal 18 ayat 4 UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 22E pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Perwakilan Rakyat Daerah.

Argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya pemilukada adalah dimungkinkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki kualitas dan akuntabilitas. Pilkada perlu dilakukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal dan dengan Pilkada terbuka kemungkinan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan atau daerah. Perubahan terhadap mekanisme dalam pemilihan umum di tingkat lokal daerah ternyata membawa dampak terhadap perubahan perilaku pemilih. Pada Pemilukada menunjukkan perilaku pemilih yang berbeda. Antusiasme masyarakat pemilih pada saat itu menurun dan perilaku pemilih sudah mulai bersifat rasional. Perilaku yang rasional pada dasarnya sudah tergolong

di dalamnya praktik-praktik transaksional atau jual beli suara di mana pemilih mulai menghitung imbalan dari suara yang diberikan.

Harapan dalam pilkada langsung pada dasarnya untuk menghasilkan figur kepemimpinan yang aspiratif dan berkualitas. Pilihan kepala daerah secara langsung mendekatkan pemerintah dengan rakyat disamping itu pilkada langsung adalah hasil dari tuntutan dan desakan rakyat yang menghendaki kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD tetapi rakyat dapat menggunakan hak politiknya secara langsung. Realisasi keinginan masyarakat bukanlah hal yang mudah. Perilaku memilih yang tidak rasional dalam arti melakukan pemilihan tanpa pertimbangan ideologinya merupakan yang tidak diharapkan dalam suatu Pilkada, hal ini yang pada akhirnya menyebabkan pemilihan kepala daerah oleh masyarakat tidak berhasil menciptakan sosok pimpinan daerah yang benar-benar ideal dan berkualitas. Arena pilkada memberikan kesempatan kepada masyarakat pemilih untuk melihat lebih dalam perilaku pemilih pada pilkada di Provinsi Lampung.

Berbeda dengan pemilihan legislatif ataupun presiden (nasional) kandidat yang maju dalam pilkada kemungkinan lebih banyak menggunakan isu-isu di sejumlah pilkada misalnya kita kerap melihat munculnya isu-isu seperti putra daerah calon pendatang calon penduduk asli dan sebagainya ada sejumlah alasan mengapa isu etnis lebih mungkin muncul dalam pilkada di bandingkan dengan pemilihan nasional seperti pemilu legislatif dan presiden pertama kandidat dalam pilkada umumnya bersifat lokal banyak kandidat yang maju mewakili kelompok tertentu ini menyebabkan kandidat yang kebetulan berasal

dari daerah setempat tersebut atau didukung oleh kelompok mayoritas menggunakan isu-isu dan untuk menggalang solidaritas etnis.

Hampir semua etnis memiliki simbol-simbol bunyi yang di intergrasikan menjadi irama musik atau kesenian. Misalnya suling, tambur, pluit, trompet, dan sebagainya. Partai-partai politik juga menggunakan alat komunikasi nonverbal seperti ini, untuk membentuk kebersamaan diantara mereka, dan sebagai perang urat saraf bagi lawan partai dalam berkompetisi merebut suara pemilih. Bahkan lebih lengkap lagi jika partai membuat lagu-lagu mars yang bisa memompa semangat kader dengan lirik-lirik berbagai macam mulai dari bina persatuan, mencapai kemenangan sampai kepala plesetan-plesetan yang kadang menyinggung-nyinggung lawan politik.

Aspek etnis tampaknya tidak boleh di lupakan perannya dalam pilkada latar belakang etnis kandidat sedikit banyak mempengaruhi pilihan pemilih Pemilih cenderung memilih kandidat yang berasal dari etnis yang sama aspek etnis tampaknya tidak boleh dilupakan perannya dalam pilkada Latar belakang etnis kandidat sedikit banyak mempengaruhi pemilih.

Dalam ilmu politik dikenal dengan bermacam-macam sistem pemilih umum. akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu *single-member constituency* (suatu daerah pemilihan memilih suatu wakil biasanya disebut sistem distrik) dan *multi-member constituency* (suatu daerah memilih beberapa wakil biasa dinamakan *Proportion Representation* atau sistem perwakilan berimbang).

Teori-teori dalam lapangan sosiologis menyebutkan salah satunya hanya merugikan waktu saja waktu kerja, tenaga, dan menghabiskan biaya pemilih tidak

akan memilih(golput). Ini terlihat di banyak daerah yang dapat di jadikan refrensi dan bahan renungan dengan pelaksanaan pilkada dengan munculnya wacana politik dalam ranah politik daerah terutama dalam proses demokrasi ditingkat lokal yakni dalam pilkada langsung dimana pemilihan Gubernur Lampung dilaksanakan dengan serentak dan tergolong rapih dan antusias warga mencoblos calon sangat-sangat dominan berapa informasi yang dapatkan dari media masa atau langsung dari informasi dari hasil wawancara informan.

Masyarakat di era reformasi saat ini sudah bisa berfikir cerdas dan menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan menggunakan pemikiran-pemikiran yang rasional sehingga masyarakat Provinsi Lampung bisa lebih baik dan menjadi terbaik dari sebelumnya. Masyarakat pada umumnya hanya meminta di perhatikan dan pemerintah mampu mendengar segala bentuk aspirasi dari masyarakat sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah Negara demokrasi. Pentingnya pemimpin dan kepemimpinan ini perlu dipahami dan dihayati oleh setiap umat Islam di negeri yang mayoritas warganya beragama Islam ini, meskipun Indonesia bukanlah negara Islam.

Allah SWT telah memberi tahu kepada manusia, tentang pentingnya kepemimpinan dalam islam, sebagaimana dalam Al-Quran kita menemukan banyak ayat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan. “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih

dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Al Baqarah: 30)

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa khalifah (pemimpin) adalah pemegang mandat Allah SWT untuk mengemban amanah dan kepemimpinana langit di muka bumi. Ingat komunitas malaikat pernah memprotes terhadap kekhalifahan manusia di muka bumi. Pemilukada yang berjalan di Provinsi Lampung semoga menjadikan sosok pemimpin yang bijaksana dan adil menjalankan kewajibannya sebagai Gubernur Lampung dan mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan visi dan misi yang pernah dijanjikan sebagai calon Gubernur Lampung dalam kampanye politiknya.

Dalam masyarakat, sering diartikan, orang yang populer dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebaliknya, seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi adalah orang yang populer. Popularitas dan elektabilitas tidak selalu berjalan seiring. Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal baik secara meluas dalam masyarakat. Ada orang baik, yang memiliki kinerja tinggi dalam bidang yang ada hubungannya dengan jabatan publik yang ingin dicapai, tetapi karena tidak ada yang memperkenalkan menjadi tidak elektabel. Sebaliknya, orang yang berprestasi tinggi dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan jabatan publik, boleh jadi mempunyai elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat.

1. Survei Politik

Survei politik merupakan sebuah media yang bisa menunjukkan elektabilitas suatu kandidat atau partai politik pada saat menjelang pilkada. Di dalam negara demokrasi, survei menjadi instrument demokrasi dan biasanya dilakukan oleh

lembaga yang otoritatif baik dari lembaga survei independen maupun lembaga survei partai politik/kandidat tertentu.

Namun, terkait survei LSI yang menunjukkan tingkat elektabilitas suatu pasangan calon tertentu. Tentu hasil survei tersebut sangat dinamis dan debatable. Sah-sah saja dari pasangan calon tertentu menyikapi pro maupun kontra pada hasil survei ini. Ada beberapa variabel yang bisa mempengaruhi hasil survei terutama terkait dengan elektabilitas kandidat dimata masyarakat. Pertama, metodologi yang dipergunakan dalam survei sangat mempengaruhi hasil dari survei tersebut, seberapa akurat maupun kesalahan dalam penelitian tersebut. Dan ini persoalan yang mendasar apakah survei itu bisa diakui kesohihannya atau diragukan. Kedua, waktu survei menentukan hasil yang diperolehnya. Perbedaan waktu ini sangat berpotensi akan merubah hasil dari survei sebelumnya. Pada bulan ini hasil survei LSI menghasilkan pasangan Foke-Nara peringkat pertama, namun ada kemungkinan berbeda hasilnya ketika LSI mengadakan satu atau dua bulan berikutnya. Ketiga, pengetahuan dan tempat lokasi responden juga akan menentukan hasil survei. Pengetahuan masyarakat sangat dinamis, apalagi untuk konteks Jakarta yang notabene sebagai ibukota negara di mana informasi begitu cepat dan massif, akan merubah persepsi warga masyarakatnya dalam melihat realitas sosial.

2. Perilaku pemilih

Adapun perilaku pemilih menurut Surbakti adalah : “Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) didalam suatu pemilihan

umum (Pilkada secara langsung). Bila *voters* memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka *voters* akan memilih atau mendukung kandidat tertentu”.

Keputusan untuk memberikan dukungan dan suara tidak akan terjadi apabila tidak terdapat loyalitas pemilih yang cukup tinggi kepada calon pemimpin jagoannya. Begitu juga sebaliknya, pemilih tidak akan memberikan suaranya kalau mereka menganggap bahwa sebuah partai atau calon pemimpin tidak loyal serta tidak konsisten dengan janji dan harapan yang telah mereka berikan.

Perilaku pemilih juga sarat dengan ideologi antara pemilih dengan partai politik atau kontestan pemilu. Masing-masing kontestan membawa ideologi yang saling berinteraksi. Selama periode kampanye pemilu, muncul kristalisasi dan pengelompokan antara ideologi yang dibawa kontestan. Masyarakat akan mengelompokkan dirinya kepada kontestan yang memiliki ideologi sama dibawa dengan yang mereka anut sekaligus juga menjauhkan diri dari ideologi yang berseberangan dengan mereka.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap elektabilitas Mustafa sebagai berikut:

1. Elektoral pasangan Mustafa dan Ahmad Jajuli turun drastis dari 14,8% menjadi 11,3%.
2. Penurunan tersebut diakibatkan oleh berpindahnya basis pemilih pasangan Mustafa dan Ahmad Jajuli kepada calon lain.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Calon kepala daerah diharapkan dapat menjaga reputasi yang baik sehingga dapat mempertahankan atau meningkatkan elektabilitasnya untuk dipilih menjadi kepala daerah.
2. Bagi peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian tentang pengaruh tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap elektabilitas calon kepala daerah dengan menggunakan metode lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Ali Moertopo, *Stabilitas Politik Pada Masa Pemerintahan Odre Baru*, Jakarta: PT Elex. Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.
- Andi Hamzah. 1995. *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Chaerudin dkk. 2006. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama, Bandung.
- Dan Nimmo. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. (Bandung: Rosda Karya, 2009).
- Harmien Hadiati dan Koeswadji. 1994. *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan Ketindak Pidana Korupsi*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Indryanto Seno Adji. 2006. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Diadit Media, Jakarta.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1996).
- Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum PidanaIndonesia*. Alumni, Bandung.
- Leden Marpaung. 2004. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Djambatan, Jakarta
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mochtar Lubis & James C. Scott. 1993. *Bunga Rampai Korupsi*. LP3ES, Jakarta.

- Nadirsyah Hawari, 2009. *Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: AMZAH.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Rahman Nitibaskara. 2005. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Kompas, Jakarta
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Syed Hussein Alatas, 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. LP3ES, Jakarta.
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, Pustaka Baru, 2014)

B. Sumber Jurnal

- Asep Rahmat Fajar. 2008. *Pembaharuan Kejaksaan: Kebutuhan di Tengah Berbagai Permasalahan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia di Undip Semarang, Tanggal 29 Nopember 2008.
- Fahdi Fahlevi, 2018, *KPK tetapkan Bupati Lampung Tengah sebagai tersangka suap pinjaman APBD*, (online) tersedia di <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/16/kpk-tetapkan-bupati-lampung-tengah-sebagai-tersangka-suap-pinjaman-apbd>, diakses (15 Oktober 2018).
- Harkristuti Harkrisnowo. 2002. *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*. Jurnal DictumLeIP Edisi I Lentera Hati, Jakarta.
- Hendarman Supandji. 2009. *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*. Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip Semarang, Tanggal 27 Februari 2009.
- Imelda Astari, *Charta Politika: Kasus OTT Gerogoti Basis Massa Mustafa, Lampung Tengah dikuasai Ridho*, Artikel diunduh dari <http://duajurai.co/2018/03/20/charta-politika-kasus-ott-gerogoti-basis-massa-mustafa-lampung-tengah-dikuasai-ridho/> Tanggal 11 Februari 2019.
- Nadirsyah Hawari, *Parpol Islam Dan Pemberantasan Korupsi DI Indonesia*, <https://www.googlecendikia.com> diunduh Tanggal 3 September 2019.
- Nadirsyah Hawari, *Mencermati Isu Nepotisme Kepemimpinan Utsman Bin "Affan*, <https://www.googlecendikia.com> diunduh Tanggal 3 September 2019.

Yoso, 2018, *15 KPU Kabupaten/Kota Pleno Data Pemilih Pilgub Lampung, Ini Hasilnya*, (online) tersedia di <http://lampung.tribunnews.com/2018/04/18/15-kpu-kabupatenkota-pleno-data-pemilih-pilgub-lampung-ini-hasilnya?page=all>, diakses (3 Desember 2018)

C. Sumber Hukum

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 58 huruf F

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

